



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Teleng No. 1 Banyuasri / (0362) 21843 / <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>



Disperkimta Buleleng Bali



Disperkimta.bulelengkab



Disperkimta@bulelengkab.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2020 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta analisis capaiannya selama tahun 2020.

Secara umum target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat tercapai dikarenakan pandemi covid-19. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Singaraja, 04 Januari 2021



Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,

**Ni Nyoman Surattini, ST.**

Berbina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19670102 199803 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.4 ISU-ISU STRATEGIS .....	13
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	15
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	22
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	93
<b>BAB IV  PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik/sangat berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 7 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 6 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%) dan 1 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori tidak berhasil (capaian kinerja <55 sd 0%) sasaran strategis dan indikator capaian sasaran sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil

a. Sasaran : *Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR*

Indikator sasaran : Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni

Target kinerja 64,90%, realisasi 54,80%, capaian kinerja 84,43%

b. Sasaran : *Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*

Indikator sasaran : Persentase Kualitas Kawasan Permukiman

Target kinerja 64,29%, realisasi 61.24%, capaian kinerja 95,25%

c. Sasaran : *Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan.*

Indikator sasaran : Persentase Pengelolaan RTH Publik Pada Kawasan Perkotaan.

Target kinerja 91,43%, realisasi 84,09%, capaian kinerja 91,97%

d. Sasaran : *Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan*

Indikator sasaran : Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan.

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

e. Sasaran : *Menurunnya konflik pertanahan*

Indikator sasaran : Prosentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

f. Sasaran : *Meningkatnya informasi pertanahan*

Indikator sasaran : Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat.

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

2. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori tidak berhasil

a. Sasaran : *Tertanganinya rumah akibat bencana alam*

Indikator sasaran : Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni

Target kinerja 100%, realisasi 0%, capaian kinerja 0%

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

## **1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan, jenis, kriteria tipologi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah semua diatur kedalam peraturan pemerintah yang mengharuskan daerah mengikuti regulasi yang berlaku serta merubah kedudukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria dan pembobotan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan regulasi tersebut diatas, maka untuk menjalankan amanah dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mengalami perubahan, salah satunya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Struktur Organisasinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

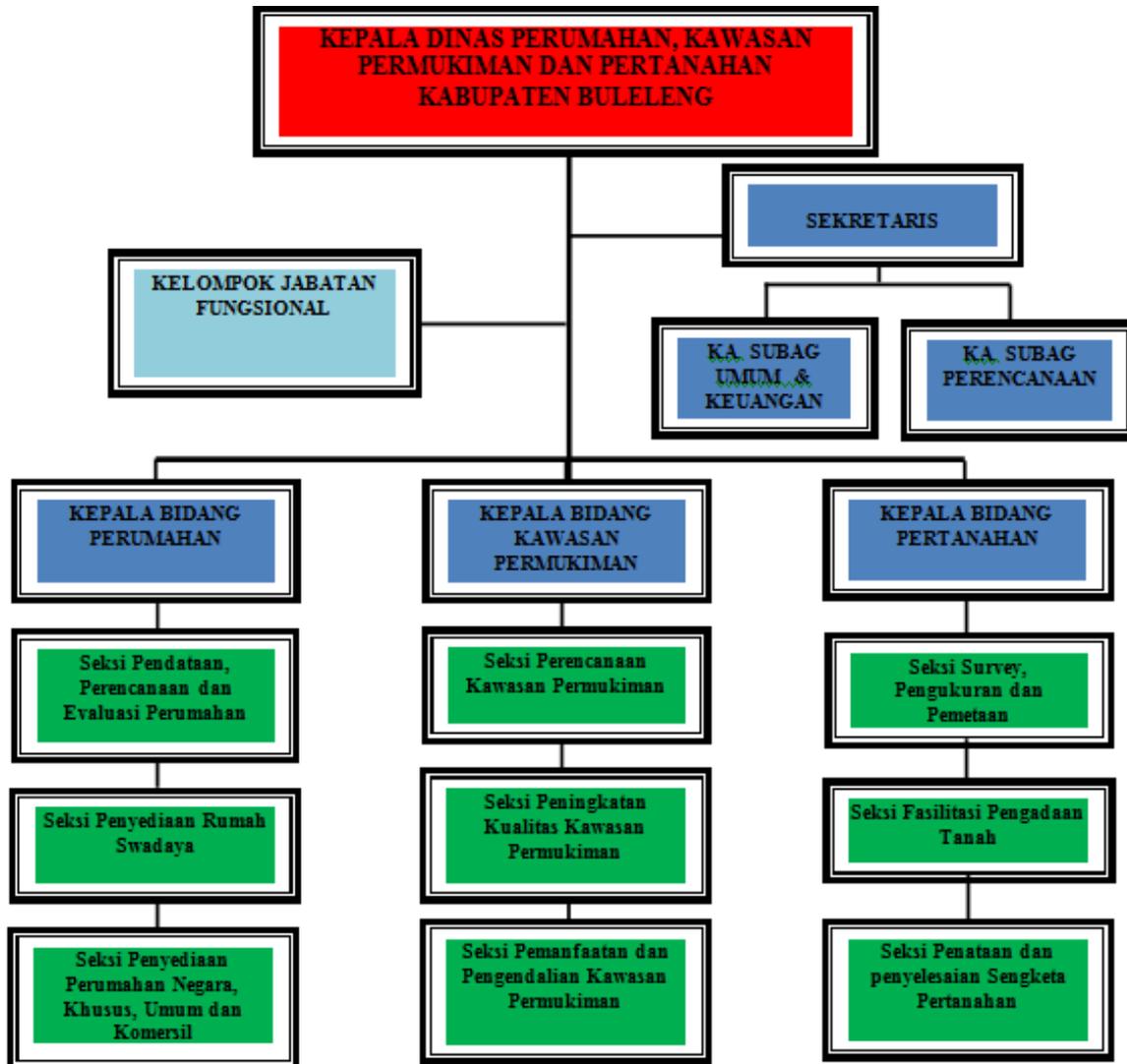
Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan. adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN SESUAI PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 55 TAHUN 2020



Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan.
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPT.
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- k. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya.
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretariat

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha,

- keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT.
  - j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rencana teknis perumahan.
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tingkat Kemampuan Kecil.
- f. Melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan program pembiayaan perumahan.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain.
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta menyiapkan Petunjuk Teknis.
- j. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah

Swadaya.

- k. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan Swadaya.
- l. Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- m. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah Negara, Khusus, Umum dan Komersil.
- n. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil.
- o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Kawasan Permukiman.
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain bidang penataan Kawasan Permukiman.
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penataan Kawasan Permukiman.
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan pengaturan kebijakan dan strategi bidang

Kawasan Permukiman.

- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan kinerja bidang Kawasan Permukiman.
- i. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database kawasan permukiman dan rencana teknis kawasan permukiman.
- j. Menyusun perencanaan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman.
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman.
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kawasan permukiman dengan fasilitasi penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
- m. Melaksanakan penataan, dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) khusus Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman.
- n. Melaksanakan pemeliharaan taman pada kawasan ruang terbuka hijau fasilitas umum dan boulevard di kawasan permukiman.
- o. Melaksanakan pemeliharaan patung, tugu, median jalan, taman telajakan, taman pulau dan pohon perindang jalan di kawasan permukiman.
- p. Melaksanakan penebangan pohon perindang, penempatan reklame, perlengkapan dan ornament bangunan yang mempengaruhi keindahan kota.
- q. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- r. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan pengaturan bidang Pertanahan.
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian ijin penggunaan pemanfaatan tanah dalam satu Daerah Kabupaten.
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan pertanahan.
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi pertanahan.
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam daerah kabupaten.
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
- m. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam

daerah kabupaten.

- n. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.4 ISU- ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis SKPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena memiliki dampak yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

##### **1. Permukiman kumuh yang semakin meluas**

Makin meluasnya permukiman kumuh disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar

masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK, masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan mahalnnya harga lahan di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah perkotaan.

## 2. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

## 3. Luas RTH Perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%

Menjadi permasalahan lingkungan hidup perkotaan, dengan tidak sebanding tingginya kebutuhan masyarakat dengan perkembangan kota. Masyarakat menginginkan lingkungan yang indah, asri dan sehat, sedangkan perkembangan, pertumbuhan dan aktivitas kota membuat turunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **A. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan serta sasaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tujuan : ***Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik***

Indikator Tujuan : ***Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan***

Adapun Sasarannya adalah : ***Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik***

Indikator Sasaran : ***Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan***

## **2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang memerlukan penjabaran

dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **A. Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Strategi :

- Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Kebijakan :

- Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan yang layak dan berkelanjutan.

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	64,90%	Program Pengembangan Perumahan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

## **2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	64,90%	- Program Pengembangan Perumahan	3.843.689.800
			- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	141.681.800
			- Program Peningkatan Kualitas kawasan permukiman	64.700.000
			- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	4.185.193.400
			- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	76.335.800
			- Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	21.734.800,00
			- Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan	45.998.900

## **2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, dengan melaksanakan 12 program dan 37 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

### **1. Urusan Wajib Non Urusan**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- Pendataan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
- Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Anggaran SKPD

## **2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)**

### a. Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan.

### b. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

- Kegiatan Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitas Rumah Akibat Bencana Alam

### c. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

### d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah

- Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

## **3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pertanahan)**

### a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
- Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 3

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Buleleng,. Adapun uraian Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4

**Indikator Kinerja Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

### 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja sasaran maka capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya.

Tabel 5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)	Ket.
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	64,90	54,80	84,44	IKU

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Indikator Kinerja Sasaran
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Jumlah dari capaian persentase MBR yang menghuni rumah layak huni

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan diperoleh dari jumlah perhitungan capaian program pengembangan perumahan (persentase MBR yang menghuni rumah layak huni). Hasil capaian indikator dimaksud dijabarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan dibawah ini, sehingga analisa capaian IKU hanya menghitung dari capaian satu program tersebut. Adapun penghitungannya sebagai berikut :

Capaian program pengembangan perumahan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani (penanganan Rumah Swadaya s/d tahun 2020)}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5.414 \text{ unit}}{9.879 \text{ unit}} \times 100 \% \\
 &= 54.80\%
 \end{aligned}$$

Capaiannya diperoleh dari perhitungan

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{54,80}{64,90} \times 100 \% \\
 &= 84,44 \%
 \end{aligned}$$

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik</i>				
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	64,90	54,80	84,44

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebesar 84,44% dengan predikat **sangat berhasil**. Analisa capaian masing-masing program tersebut dapat dijelaskan pada capaian penanganan RTLH yang secara rinci dapat dijabarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan dibawah ini.

## 2. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan

Capaian kinerja tahunan diukur dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengukuran capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR</i>				
1	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	64,90	54,80	84,44

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni sebesar 84,44% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \frac{\Sigma \text{ RTLH yang ditangani (penanganan Rumah Swadaya s/d tahun 2020 )}}{\Sigma \text{ RTLH Kab. Buleleng}} \times 100 \% \\ &= \frac{5.414 \text{ unit}}{9.879 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 54.80\% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kegiatan pendampingan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

#### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan pagu anggaran Rp. 86.780.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.716.680,- 99,23% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja fotocopy, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja BBM sebesar Rp. 64.120,- (0,073%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdiri dari :

##### a) Penyusunan data usulan rumah tidak layak huni tahun 2020

Pelaksanaan penyusunan data usulan rumah tidak layak huni tahun 2020 bertujuan sebagai basis data RTLH yang belum tertangani pada Tahun 2020 yang diusulkan desa kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk arah perencanaan, kebijakan pada tahun 2021. Data usulan rumah tidak layak huni yang tersusun dari awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 bersumber dari data yang diberikan oleh desa yang disampaikan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kab. Buleleng dengan jumlah total 2.762 unit usulan rumah tidak layak huni. Dengan rincian tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 6  
Data usulan rumah tidak layak huni tahun 2020

No	Kecamatan	Desa		Jumlah Usulan RTLH (Unit)
1	Tejakula	1	Bondalem	-
		2	Julah	-
		3	Les	-
		4	Madenan	-
		5	Pacung	141
		6	Penuktukan	-
		7	Sambirenteng	218
		8	Sembiran	108
		9	Tejakula	17
		10	Tembok	-
<b>Jumlah Kecamatan Tejakula</b>				<b>484</b>
2	Kubutambahan	1	Bengkala	-
		2	Bila	-
		3	Bontihing	-
		4	Bukti	-
		5	Bulian	-
		6	Depeha	226
		7	Kubutambahan	-
		8	Mengening	-
		9	Pakistan	57
		10	Tajun	-
		11	Tambakan	-
		12	Tamblang	113
		13	Tunjung	81
<b>Jumlah Kecamatan Kubutambahan</b>				<b>477</b>
3	Sawan	1	Bebetin	-
		2	Bungkulan	1
		3	Galungan	-
		4	Giri Emas	-
		5	Jagaraga	-
		6	Kerobokan	-
		7	Lemukih	-
		8	Menyali	51

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		9	Sangsit	71
		10	Sawan	-
		11	Sekumpul	-
		12	Sinabun	-
		13	Sudaji	-
		14	Suwug	-
<b>Jumlah Kecamatan Sawan</b>				<b>123</b>
<b>4</b>	<b>Buleleng</b>	1	Alasangker	-
		2	Anturan	71
		3	Baktiseraga	1
		4	Banyuasri	-
		5	Banyuning	-
		6	Beratan	-
		7	Jinengdalem	28
		8	Kalibukbuk	-
		9	Kaliuntu	-
		10	Kampung Anyar	18
		11	Kampung Baru	-
		12	Kampung Bugis	-
		13	Kampung Singaraja	-
		14	Kampung Kajanan	-
		15	Liligundi	29
		16	Nagasepaha	18
		17	Paket Agung	-
		18	Pemaron	65
		19	Penarukan	109
		20	Pengelatan	54
		21	Petandakan	113
		22	Poh Bergong	40
		23	Sari Mekar	-
		24	Tukadmungga	1
		25	Banjar Tegal	-
		26	Kendran	-
		27	Astina	-
		28	Banjar Jawa	-
		29	Banjar Bali	-
<b>Jumlah Kecamatan Buleleng</b>				<b>547</b>
<b>5</b>	<b>Sukasada</b>	1	Ambengan	-
		2	Gitgit	-
		3	Kayuputih	190
		4	Padangbulia	33
		5	Pancasari	-
		6	Panji	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		7	Panji Anom	200
		8	Pegadungan	41
		9	Pegayaman	-
		10	Sambangan	-
		11	Selat	-
		12	Silangjana	21
		13	Sukasada	11
		14	Tegal Linggah	-
		15	Wanagiri	-
<b>Jumlah Kecamatan Sukasada</b>				<b>496</b>
<b>6</b>	<b>Seririt</b>	1	Munduk Bestala	-
		2	Banjar Asem	-
		3	Bestala	28
		4	Bubunan	-
		5	Gunungsari	1
		6	Joanyar	-
		7	Kalianget	-
		8	Kalisada	6
		9	Lokapaksa	1
		10	Mayong	-
		11	Pangkungparuk	-
		12	Patemon	-
		13	Pengastulan	-
		14	Rangdu	-
		15	Ringdikit	-
		16	Seririt	-
		17	Sulanyah	43
		18	Tanguwisia	-
		19	Ularan	-
		20	Umeanyar	-
		21	Unggahan	-
<b>Jumlah Kecamatan Seririt</b>				<b>79</b>
<b>7</b>	<b>Banjar</b>	1	Banjar	-
		2	Banjar Tegaha	19
		3	Banyuatis	-
		4	Banyusri	-
		5	Cempaga	-
		6	Dencarik	-
		7	Gesing	-
		8	Gobleg	1
		9	Kaliasem	-
		10	Kayuputih	-
		11	Munduk	-
		12	Pedawa	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		13	Sidetapa	-
		14	Tampekan	26
		15	Temukus	-
		16	Tigawasa	-
		17	Tirtasari	51
<b>Jumlah Kecamatan Banjar</b>				<b>97</b>
<b>8</b>	<b>Busungbiu</b>	1	Bengkel	-
		2	Bongancina	-
		3	Busungbiu	-
		5	Kedis	-
		6	Kekeran	-
		7	Pelapuan	-
		8	Pucaksari	-
		9	Sepang	-
		10	Sepang Kelod	-
		11	Subuk	-
		12	Telaga	-
		13	Tinggarsari	-
		14	Tista	1
		15	Titab	-
		16	Umejero	-
<b>Jumlah Kecamatan Busungbiu</b>				<b>1</b>
<b>9</b>	<b>Gerokgak</b>	1	Banyupoh	-
		2	Celukan Bawang	-
		3	Gerokgak	-
		4	Musi	-
		5	Patas	-
		6	Pejarakan	-
		7	Pemuteran	-
		8	Pengulon	-
		9	Penyabangan	-
		10	Sanggalangit	-
		11	Sumber Klampok	-
		12	Sumberkima	-
		13	Tinga tinga	260
		14	Tukad Sumaga	198
<b>Jumlah Kecamatan Gerokgak</b>				<b>458</b>
<b>TOTAL KABUPATEN BULELENG</b>				<b>2.762</b>

b) Penyusunan data kepemilikan rumah hunian (backlog)

Pelaksanaan penyusunan data backlog melanjutkan data existing pada tahun 2019, data yang belum terpenuhi dilaksanakan penjajagan langsung ke desa. Hasil pendataan sebagai mana terlampir dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7

**Data Jumlah Penduduk, Jumlah KK, Jumlah Rumah, Backlog**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Backlog
1	Tejakula	74.049	21.195	16.840	2.154
2	Kubutambahan	63.285	17.893	15.895	1.875
3	Sawan	86.738	24.532	46.460	1.676
4	Buleleng	44.087	13.040	10.898	1.513
5	Sukasada	87.233	24.225	14.758	855
6	Seririt	55.262	15.891	11.953	2.965
7	Banjar	75.577	21.732	20.160	1938
8	Busungbiu	51.521	13.901	10.883	406
9	Gerokgak	81.388	24.732	20.838	4.896
<b>TOTAL</b>		<b>619.140</b>	<b>177.141</b>	<b>168.685</b>	<b>18.489</b>

c) Penyusunan, pembaharuan data jumlah penangan Rumah Tidak Layak Huni sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Buleleng.

Jumlah penangan rumah layak huni di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2020 adalah 6.171 dan sisa RTLH samapi dengan tahun 2020 adalah 5.672 dari jumlah RTLH keseluruhan sebanyak 11.843. Dengan rincian data tersaji pada tabel dibawah :

Tabel 8

**Data penangan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017- 2020**

No	Kecamatan	Data RTLH	RTLH Tambahan	Penanganan				Sisa RTLH Tahun 2020
				2017	2018	2019	2020	
1	Kecamatan Banjar	1.676	153	151	172	539	-	967
2	Kecamatan Buleleng	1.167	303	144	288	328	193	517
3	Kecamatan Busungbiu	661	88	58	189	42	-	460

4	Kecamatan Gerokgak	1.874	287	359	133	266	100	1303
5	Kecamatan Kubutambahan	991	244	162	200	253	103	517
6	Kecamatan Sawan	631	251	96	261	202	97	226
7	Kecamatan Seririt	1.137	239	414	144	22	-	796
8	Kecamatan Sukasada	1.059	45	187	135	59	-	723
9	Kecamatan Tejakula	683	354	62	291	171	350	163
<b>Jumlah</b>		<b>9.879</b>	<b>1.964</b>	<b>1.633</b>	<b>1.813</b>	<b>1.882</b>	<b>843</b>	<b>5.672</b>

d) Penyusunan data Rumah Tidak Layak huni dan Backlog pada aplikasi E-RTLH.

Penyusunan data pada aplikasi E-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rencana dan arah kebijakan dalam penanganan rumah tidak layak huni dan backlog khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tabel 9

**Data Rumah Tidak Layak Huni dari basis data E-RTLH**

No	Kecamatan	Desa		Jumlah RTLH dari basis data E-RTLH
<b>1</b>	<b>Tejakula</b>	1	Bondalem	299
		2	Julah	21
		3	Les	32
		4	Madenan	-
		5	Pacung	218
		6	Penuktukan	71
		7	Sambirenteng	59
		8	Sembiran	25
		9	Tejakula	139
		10	Tembok	40
<b>Jumlah Kecamatan Tejakula</b>				<b>904</b>
<b>2</b>	<b>Kubutambahan</b>	1	Bengkala	4
		2	Bila	35
		3	Bontihing	1
		4	Bukti	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		5	Bulian	34
		6	Depeha	-
		7	Kubutambahan	41
		8	Mengening	-
		9	Pakistan	10
		10	Tajun	4
		11	Tambakan	19
		12	Tamblang	147
		13	Tunjung	306
<b>Jumlah Kecamatan Kubutambahan</b>				<b>601</b>
<b>3</b>	<b>Sawan</b>	1	Bebetin	-
		2	Bungkulan	134
		3	Galungan	24
		4	Giri Emas	62
		5	Jagaraga	154
		6	Kerobokan	6
		7	Lemukih	-
		8	Menyali	25
		9	Sangsit	216
		10	Sawan	-
		11	Sekumpul	80
		12	Sinabun	-
		13	Sudaji	-
		14	Suwug	-
<b>Jumlah Kecamatan Sawan</b>				<b>701</b>
<b>4</b>	<b>Buleleng</b>	1	Alasangker	-
		2	Anturan	113
		3	Baktiseraga	1
		4	Banyuasri	-
		5	Banyuning	-
		6	Beratan	21
		7	Jinengdalem	41
		8	Kalibukbuk	15
		9	Kaliuntu	-
		10	Kampung Anyar	1
		11	Kampung Baru	15
		12	Kampung Bugis	18
		13	Kampung Singaraja	-
		14	Kampung Kajanan	-
		15	Liligundi	-
		16	Nagasepaha	30
		17	Paket Agung	60

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		18	Pemaron	80
		19	Penarukan	88
		20	Pengelatan	11
		21	Petandakan	58
		22	Poh Bergong	41
		23	Sari Mekar	16
		24	Tukadmungga	1
		25	Banjar Tegal	-
		26	Kendran	-
		27	Astina	1
		28	Banjar Jawa	-
		29	Banjar Bali	-
<b>Jumlah Kecamatan Buleleng</b>				<b>611</b>
<b>5</b>	<b>Sukasada</b>	1	Ambengan	161
		2	Gitgit	-
		3	Kayuputih	4
		4	Padangbulia	159
		5	Pancasari	-
		6	Panji	4
		7	Panji Anom	273
		8	Pegadungan	88
		9	Pegayaman	-
		10	Sambangan	1
		11	Selat	-
		12	Silangjana	17
		13	Sukasada	-
		14	Tegal Linggah	-
		15	Wanagiri	94
<b>Jumlah Kecamatan Sukasada</b>				<b>801</b>
<b>6</b>	<b>Seririt</b>	1	Munduk Bestala	-
		2	Banjar Asem	-
		3	Bestala	80
		4	Bubunan	-
		5	Gunungsari	1
		6	Joanyar	208
		7	Kalianget	-
		8	Kalisada	6
		9	Lokapaksa	240
		10	Mayong	23
		11	Pangkungparuk	591
		12	Patemon	19
		13	Pengastulan	-
		14	Rangdu	21
		15	Ringdikit	189

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

		16	Seririt	81
		17	Sulanyah	14
		18	Tangguwisia	5
		19	Ularan	92
		20	Umeanyar	11
		21	Unggahan	81
<b>Jumlah Kecamatan Seririt</b>				<b>1.662</b>
<b>7</b>	<b>Banjar</b>	1	Banjar	-
		2	Banjar Tegaha	53
		3	Banyuatis	13
		4	Banyusri	-
		5	Cempaga	-
		6	Dencarik	89
		7	Gesing	-
		8	Gobleg	296
		9	Kaliasem	236
		10	Kayuputih	53
		11	Munduk	-
		12	Pedawa	103
		13	Sidetapa	235
		14	Tampekan	58
		15	Temukus	-
		16	Tigawasa	54
		17	Tirtasari	164
<b>Jumlah Kecamatan Banjar</b>				<b>1.354</b>
<b>8</b>	<b>Busungbiu</b>	1	Bengkel	104
		2	Bongancina	-
		3	Busungbiu	199
		4	Kedis	-
		5	Kekeran	-
		6	Pelapuan	-
		7	Pucaksari	22
		8	Sepang	33
		9	Sepang Kelod	-
		10	Subuk	-
		11	Telaga	-
		12	Tinggarsari	-
		13	Tista	24
		14	Titab	-
		15	Umejero	-
<b>Jumlah Kecamatan Busungbiu</b>				<b>382</b>
<b>9</b>	<b>Gerokgak</b>	1	Banyupoh	6

		2	Celukan Bawang	-
		3	Gerokgak	534
		4	Musi	102
		5	Patas	609
		6	Pejarakan	730
		7	Pemuteran	734
		8	Pengulon	73
		9	Penyabangan	-
		10	Sanggalangit	239
		11	Sumber Klampok	-
		12	Sumberkima	24
		13	Tinga tinga	-
		14	Tukad Sumaga	16
<b>Jumlah Kecamatan Gerokgak</b>				<b>3.067</b>
<b>TOTAL KABUPATEN BULELENG</b>				<b>10.083</b>

Tabel 10

**Data Backlog dari basis data E-RTLH**

No	Kecamatan	Desa		Jumlah Backlog dari basis data E-RTLH
<b>1</b>	<b>Tejakula</b>	1	Bondalem	39
		2	Julah	-
		3	Les	1
		4	Madenan	-
		5	Pacung	23
		6	Penuktukan	2
		7	Sambirenteng	1
		8	Sembiran	24
		9	Tejakula	60
		10	Tembok	1
<b>Jumlah Kecamatan Tejakula</b>				<b>151</b>
<b>2</b>	<b>Kubutambahan</b>	1	Bengkala	-
		2	Bila	-
		3	Bontihing	-
		4	Bukti	-
		5	Bulian	1
		6	Depeha	-
		7	Kubutambahan	19
		8	Mengening	6
		9	Pakistan	8

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

		10	Tajun	-
		11	Tambakan	13
		12	Tamblang	17
		13	Tunjung	20
<b>Jumlah Kecamatan Kubutambahan</b>				<b>84</b>
<b>3</b>	<b>Sawan</b>	1	Bebetin	-
		2	Bungkulan	2
		3	Galungan	12
		4	Giri Emas	19
		5	Jagaraga	41
		6	Kerobokan	-
		7	Lemukih	2
		8	Menyali	10
		9	Sangsit	47
		10	Sawan	1
		11	Sekumpul	80
		12	Sinabun	-
		13	Sudaji	1
		14	Suwug	-
<b>Jumlah Kecamatan Sawan</b>				<b>215</b>
<b>4</b>	<b>Buleleng</b>	1	Alasangker	-
		2	Anturan	41
		3	Baktiseraga	1
		4	Banyuasri	-
		5	Banyuning	2
		6	Beratan	1
		7	Jinengdalem	-
		8	Kalibukbuk	-
		9	Kaliuntu	-
		10	Kampung Anyar	-
		11	Kampung Baru	-
		12	Kampung Bugis	-
		13	Kampung Singaraja	-
		14	Kampung Kajan	-
		15	Liligundi	-
		16	Nagasepaha	17
		17	Paket Agung	6
		18	Pemaron	-
		19	Penarukan	24
		20	Pengelatan	13
		21	Petandakan	-
		22	Poh Bergong	-
		23	Sari Mekar	-

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

		24	Tukadmungga	-
		25	Banjar Tegal	-
		26	Kendran	-
		27	Astina	-
		28	Banjar Jawa	-
		29	Banjar Bali	-
<b>Jumlah Kecamatan Buleleng</b>				<b>155</b>
<b>5</b>	<b>Sukasada</b>	1	Ambengan	6
		2	Gitgit	-
		3	Kayuputih	3
		4	Padangbulia	-
		5	Pancasari	7
		6	Panji	-
		7	Panji Anom	14
		8	Pegadungan	22
		9	Pegayaman	8
		10	Sambangan	3
		11	Selat	3
		12	Silangjana	-
		13	Sukasada	-
		14	Tegal Linggah	4
		15	Wanagiri	14
<b>Jumlah Kecamatan Sukasada</b>				<b>84</b>
<b>6</b>	<b>Seririt</b>	1	Munduk Bestala	-
		2	Banjar Asem	1
		3	Bestala	10
		4	Bubunan	2
		5	Gunungsari	-
		6	Joanyar	16
		7	Kalianget	-
		8	Kalisada	-
		9	Lokapaksa	32
		10	Mayong	-
		11	Pangkungparuk	337
		12	Patemon	7
		13	Pengastulan	1
		14	Rangdu	-
		15	Ringdikit	20
		16	Seririt	82
		17	Sulanyah	15
		18	Tangguwisia	-
		19	Ularan	-
		20	Umeanyar	-
		21	Unggahan	10

<b>Jumlah Kecamatan Seririt</b>				<b>533</b>
<b>7</b>	<b>Banjar</b>	1	Banjar	46
		2	Banjar Tegaha	30
		3	Banyuatis	4
		4	Banyusri	1
		5	Cempaga	-
		6	Dencarik	11
		7	Gesing	1
		8	Gobleg	32
		9	Kaliasem	1
		10	Kayuputih	8
		11	Munduk	4
		12	Pedawa	1
		13	Sidetapa	3
		14	Tampekan	39
		15	Temukus	2
		16	Tigawasa	8
		17	Tirtasari	66
<b>Jumlah Kecamatan Banjar</b>				<b>257</b>
<b>8</b>	<b>Busungbiu</b>	1	Bengkel	58
		2	Bongancina	-
		3	Busungbiu	19
		4	Kedis	-
		5	Kekeran	-
		6	Pelapuan	1
		7	Pucaksari	1
		8	Sepang	2
		9	Sepang Kelod	3
		10	Subuk	-
		11	Telaga	-
		12	Tinggarsari	3
		13	Tista	1
		14	Titab	-
		15	Umejero	3
<b>Jumlah Kecamatan Busungbiu</b>				<b>91</b>
<b>9</b>	<b>Gerokgak</b>	1	Banyupoh	25
		2	Celukan Bawang	32
		3	Gerokgak	51
		4	Musi	48
		5	Patas	208
		6	Pejarakan	174
		7	Pemuteran	98
		8	Pengulon	64

	9	Penyabangan	22
	10	Sanggalangit	54
	11	Sumber Klampok	3
	12	Sumberkima	120
	13	Tinga tinga	45
	14	Tukad Sumaga	30
<b>Jumlah Kecamatan Gerokgak</b>			<b>974</b>
<b>TOTAL KABUPATEN BULELENG</b>			<b>2.544</b>

e) Penyusunan dokumen usulan rumah swadaya pada program Bantuan Stimulan.

Perumahan Swadaya (BSPS) APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021. Data rincian usulan secara detail tersaji pada tabel dibawah :

1) Usulan Proposal Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun 2021 Kabupaten Buleleng ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan Di Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tabel 11

**Data pengajuan usulan penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan/ DAK Perumahan**

NO	LOKASI		JUMLAH
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1	Buleleng	Desa Anturan	55
		Kelurahan Beratan	27
		Desa Jinengdalem	13
		Kelurahan Kampung Anyar	32
		Kelurahan Kampung Bugis	13
		Kelurahan Kampung Baru	14
		Desa Nagasepeha	15
		Kelurahan Paket Agung	20
		Desa Pamaron	48
		Kelurahan Penarukan	52
		Desa Petandakan	38
		Desa Poh Bergong	78
		Desa Sari Mekar	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>422</b>	

2) Usulan Proposal Pembangunan Rumah Swadaya Tahun 2021 di Kabupaten Buleleng ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Tabel 12

**Data pengajuan usulan penangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 melalui APBD Prov. Bali**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tejakula	Desa Madenan	27
		Desa Pacung	28
		Desa Tejakula	16
2	Kubutambahan	Desa Bengkala	12
		Desa Bila	7
		Desa Mengening	17
		Desa Tambakan	40
		Desa Tunjung	78
		Desa Tamblang	50
3	Sawan	Desa Kerobokan	10
		Desa Sekumpul	24
		Desa Sangsit	30
4	Buleleng	Desa Baktiseraga	30
		Desa Petandakan	68
		Desa Penglatan	54
		Desa Pamaron	30
5	Banjar	Desa Gobleg	47
		Desa Tampekan	31
		Desa Banjar Tegeha	19
		Desa Tirtasari	30
6	Sukasada	Desa Ambengan	31
		Desa Gitgit	8
		Desa Silangjana	21
		Desa Padangbulia	30
		Desa Panji Anom	30
		Desa Pegadungan	30
		Kelurahan Sukasada	11
7	Seririt	Desa Besatala	28
		Desa Gunung Sari	17
		Desa Joanyar	43
		Desa Kalianget	29
		Desa Kalisada	34
		Desa Munduk Bestala	5
		Desa Rangdu	7
8	Busungbiu	Desa Bengkel	19
		Desa Bongancina	5
		Desa Pelapuan	26
		Desa Puncaksari	27

		Desa Subuk	33
		Desa Telaga	12
		Desa Tinggarsari	35
		Desa Tista	35
		Desa Titab	4
		Desa Umejero	32
9	Gerokgak	Desa Banyupoh	25
		Desa Pengulon	31
<b>Jumlah</b>			<b>1.256</b>

3) Usulan Proposal Permohonan Program BSPS Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Buleleng ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Penyediaan Perumahan Di Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diantaranya :

- a. Usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) PK Th 2021 untuk Pembangunan Baru (PB).

Tabel 13

**Data pengajuan usulan penangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (PB)**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tejakula	Desa Sambirenteng	30
		Desa Sembiran	30
		Desa Tejakula	30
2	Kubutambahan	Desa Bulian	25
		Desa Kubutambahan	25
		Desa Tambakan	20
3	Sawan	Desa Menyali	20
		Desa Sangsit	20
		Desa Sekumpul	25
4	Buleleng	Desa Poh Bergong	30
5	Sukasada	Desa Ambengan	25
6	Seririt	Desa Sulanyah	20
		Desa Unggahan	30
7	Banjar	Desa Tampekan	25
8	Busungbiu	Desa Bengkel	20
9	Gerokgak	Desa Sangalangit	25
<b>Jumlah</b>			<b>400</b>

- b. Usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) PK Th 2021 untuk Peningkatan Kualitas (PK).

Tabel 14

**Data pengajuan usulan penangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas (PK)**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
1	Tejakula	Desa Tejakula	30
		Desa Julah	30
		Desa Pacung	96
		Desa Tembok	43
		Desa Les	40
2	Kubutambahan	Desa Pakisan	27
		Desa Bila	38
		Desa Bulian	36
		Desa Tamblang	41
3	Sawan	Desa Bungkulan	30
		Desa Giri Mas	44
		Desa Jagaraga	118
4	Banjar	Desa Dencarik	32
		Desa Gobleg	215
		Desa Tampekan	26
		Desa Sidatapa	125
		Desa Banyuatis	21
		Desa Kayuputih	33
		Desa Kaliasem	95
5	Sukasada	Desa Padangbulia	32
		Desa Wanagiri	33
		Desa Ambengan	25
		Desa Panji Anom	59
6	Seririt	Desa Ularan	30
		Desa Joanyar	75
		Desa Ringdikit	33
		Desa Mayong	30
		Desa Unggahan	58
7	Busungbiu	Desa Busungbiu	144
		Desa Tista	41
		Desa Puncaksari	44
8	Gerokgak	Desa Patas	330
		Desa Gerokgak	326
		Desa Pemuteran	238
		Desa Pejarakan	408
		Desa Musi	80
		Desa Pengulon	29
		<b>Jumlah</b>	<b>3.135</b>

- f) Pelaksanaan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari basis data terpadu Tahun 2016 dengan melakukan verifikasi guna mengetahui sisa dan jumlah RTLH yang sudah tertangani khususnya data RTLH yang bersumber dari Basis Data Terpadu. Rincian hasil verifikasi sebanyak 637 unit yang tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 15

**Data verifikasi Rumah Tidak Layak Huni dari Basis Data Terpadu**

No	Kecamatan	Desa		Jumlah RTLH yang telah diverifikasi dari data BDT
<b>1</b>	<b>Tejakula</b>	1	Bondalem	-
		2	Julah	-
		3	Les	92
		4	Madenan	7
		5	Pacung	1
		6	Penuktukan	-
		7	Sambirenteng	-
		8	Sembiran	-
		9	Tejakula	-
		10	Tembok	-
<b>Jumlah Kecamatan Tejakula</b>				<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Kubutambahan</b>	1	Bengkala	1
		2	Bila	5
		3	Bontihing	-
		4	Bukti	-
		5	Bulian	-
		6	Depeha	44
		7	Kubutambahan	-
		8	Mengening	11
		9	Pakistan	-
		10	Tajun	11
		11	Tambakan	-
		12	Tamblang	1
		13	Tunjung	-
<b>Jumlah Kecamatan Kubutambahan</b>				<b>73</b>
<b>3</b>	<b>Sawan</b>	1	Bebetin	-
		2	Bungkulan	-
		3	Galungan	-
		4	Giri Emas	9

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		5	Jagaraga	-
		6	Kerobokan	
		7	Lemukih	-
		8	Menyali	6
		9	Sangsit	-
		10	Sawan	-
		11	Sekumpul	-
		12	Sinabun	-
		13	Sudaji	-
		14	Suwug	-
<b>Jumlah Kecamatan Sawan</b>				<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Buleleng</b>	1	Alasangker	-
		2	Anturan	8
		3	Baktiseraga	-
		4	Banyuasri	-
		5	Banyuning	-
		6	Beratan	2
		7	Jinengdalem	-
		8	Kalibukbuk	-
		9	Kaliuntu	-
		10	Kampung Anyar	7
		11	Kampung Baru	-
		12	Kampung Bugis	-
		13	Kampung Singaraja	2
		14	Kampung Kajanan	-
		15	Liligundi	-
		16	Nagasepaha	-
		17	Paket Agung	14
		18	Pemaron	-
		19	Penarukan	4
		20	Pengelatan	0
		21	Petandakan	1
		22	Poh Bergong	-
		23	Sari Mekar	-
		24	Tukadmungga	-
		25	Banjar Tegal	-
		26	Kendran	-
		27	Astina	-
		28	Banjar Jawa	-
		29	Banjar Bali	-
<b>Jumlah Kecamatan Buleleng</b>				<b>38</b>
<b>5</b>	<b>Sukasada</b>	1	Ambengan	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

		2	Gitgit	-
		3	Kayuputih	70
		4	Padangbulia	3
		5	Pancasari	-
		6	Panji	-
		7	Panji Anom	-
		8	Pegadungan	-
		9	Pegayaman	-
		10	Sambangan	27
		11	Selat	-
		12	Silangjana	-
		13	Sukasada	-
		14	Tegal Linggah	-
		15	Wanagiri	-
<b>Jumlah Kecamatan Sukasada</b>				<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Seririt</b>	1	Munduk Bestala	-
		2	Banjar Asem	-
		3	Bestala	-
		4	Bubunan	-
		5	Gunungsari	-
		6	Joanyar	37
		7	Kalianget	-
		8	Kalisada	28
		9	Lokapaksa	-
		10	Mayong	-
		11	Pangkungparuk	-
		12	Patemon	-
		13	Pengastulan	4
		14	Rangdu	-
		15	Ringdikit	29
		16	Seririt	-
		17	Sulanyah	13
		18	Tangguwisia	-
		19	Ularan	-
		20	Umeanyar	5
		21	Unggahan	-
<b>Jumlah Kecamatan Seririt</b>				<b>116</b>
<b>7</b>	<b>Banjar</b>	1	Banjar	-
		2	Banjar Tegaha	2
		3	Banyuatis	-
		4	Banyusri	-
		5	Cempaga	125
		6	Dencarik	-
		7	Gesing	-
		8	Gobleg	-

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

		9	Kaliasem	-
		10	Kayuputih	-
		11	Munduk	-
		12	Pedawa	-
		13	Sidetapa	-
		14	Tampekan	-
		15	Temukus	-
		16	Tigawasa	-
		17	Tirtasari	-
<b>Jumlah Kecamatan Banjar</b>				<b>127</b>
<b>8</b>	<b>Busungbiu</b>	1	Bengkel	-
		2	Bongancina	-
		3	Busungbiu	55
		4	Kedis	-
		5	Kekeran	-
		6	Pelapuan	-
		7	Pucaksari	-
		8	Sepang	-
		9	Sepang Kelod	-
		10	Subuk	8
		11	Telaga	-
		12	Tinggarsari	-
		13	Tista	-
		14	Titab	-
		15	Umejero	-
<b>Jumlah Kecamatan Busungbiu</b>				<b>63</b>
<b>9</b>	<b>Gerokgak</b>	1	Banyupoh	-
		2	Celukan Bawang	-
		3	Gerokgak	-
		4	Musi	-
		5	Patas	-
		6	Pejarakan	-
		7	Pemuteran	-
		8	Pengulon	-
		9	Penyabangan	-
		10	Sanggalangit	-
		11	Sumber Klampok	-
		12	Sumberkima	-
		13	Tinga tinga	-
		14	Tukad Sumaga	-
<b>Jumlah Kecamatan Gerokgak</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL KABUPATEN BULELENG</b>				<b>637</b>

g) Pelaksanaan pendataan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Koordinator Fasilitator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perencanaan usulan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun 2021 sebanyak 4.962 unit yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 16

**Data verifikasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh korfas dan TFL program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTLH Yang Diverifikasi
1	Gerokgak	Desa Patas	405
		Desa Pejarakan	442
		Desa Pemuteran	365
		Desa Gerokgak	430
		Desa Musi	75
		Desa Pengulon	49
<b>Jumlah Kecamatan Gerokgak</b>			<b>1.766</b>
2	Tejakula	Desa Tejakula	104
		Desa Bondalem	196
		Desa Pacung	154
<b>Jumlah Kecamatan Tejakul</b>			<b>454</b>
3	Sawan	Desa Bungkulan	132
		Desa Sangsit	158
		Desa Giri Mas	44
		Desa Jagaraga	116
		Desa Menyali	20
<b>Jumlah Kecamatan Sawan</b>			<b>470</b>
4	Banjar	Desa Dencarik	62
		Desa Tampekan	52
		Desa Kayuputih	33
		Desa Banyuatis	21

		Desa Banjar Tegeha	19
		Desa Sidetapa	150
		Desa Kaliasem	187
		Desa Gobleg	215
<b>Jumlah Kecamatan Banjar</b>			<b>739</b>
5	Busungbiu	Desa Busungbiu	128
<b>Jumlah Kecamatan Busungbiu</b>			<b>128</b>
6	Sukasada	Desa Panji Anom	166
		Desa Pegadungan	60
		Desa Padangbulia	139
		Desa Wanagiri	71
		Desa Ambengan	158
<b>Jumlah Kecamatan Sukasada</b>			<b>594</b>
7	Seririt	Desa Ringdikit	170
		Desa Joanyar	130
		Desa Unggahan	52
		Desa Bestala	79
		Desa Ularan	73
<b>Jumlah Kecamatan Seririt</b>			<b>504</b>
8	Kubutambahan	Desa Tamblang	121
		Desa Tunjung	186
<b>Jumlah Kecamatan Kubutambahan</b>			<b>307</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.962</b>

- Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan perumahan tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Desa belum melaksanakan verifikasi data yang diberikan.
- b. Belum ada pengkategorian nama penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang sudah tertangani pada aplikasi E-RTLH tahun sebelumnya.

c. Pendataan untuk perencanaan usulan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun 2021 belum maksimal terkendala terhadap lokasi survey rumah masyarakat yang letak geografisnya sulit ditempuh dan berjauhan.

- Upaya Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan tersebut di atas telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terhadap permasalahan pada point a, maka tindak lanjut yang dilaksanakan terus berkoordinasi dengan aparat desa agar segera memverifikasi data yang diberikan.
2. Terhadap permasalahan pada point b, maka tindak lanjut yang dilaksanakan, melakukan pengkategorian Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani dan yang sudah tertangani dengan cara melaksanakan migrasi nama pada aplikasi E-RTLH.
3. Terhadap permasalahan pada point c, maka tindak lanjut yang dilaksanakan melibatkan aparat desa dalam melaksanakan pendataan sehingga data yang didapat bisa lebih akurat.

2. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Kegiatan Pokok Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 3.756.909.000,00 yang diperuntukkan guna membiayai kegiatan fisik dan administrasi dari jumlah plafon dana tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.716.493.812 (98,92 %) sehingga terdapat sisa dana Rp. 40.415.188,00 (1,07 %) yang seluruhnya merupakan sisa anggaran.

Kegiatan Pokok Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2020 terdiri dari, Perekrutan Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator, Penyusunan Proposal Bantuan Rumah Swadaya di 22 Desa dengan jumlah 145 proposal serta Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di 15 Desa. dan sesuai dengan Permen PUPR No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator fasilitator

Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan pada anggaran induk 2020 dianggarkan untuk 7 orang dan 2 Orang Koordinator Fasilitator Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 137.500.000,00 yang bersumber dana DAK dan APBD. Adapun rincian biaya untuk Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator fasilitator adalah :

1) Kegiatan DAK Perumahan

a) Tenaga Fasilitator : 5 orang (dikontrak selama 9 bulan)

b) Koordinator Fasilitator : 1 Orang (dikontrak selama 6 bulan)

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas rumah swadaya dari dana APBD Kabupaten Buleleng

a) Tenaga Fasilitator : 5 orang (dikontrak selama 2 bulan)

b) Koordinator Fasilitator : 1 Orang (dikontrak selama 2 bulan)

2. Penyusunan Proposal Bantuan Rumah Swadaya di 22 Desa

Kegiatan bantuan rumah swadaya melalui dana APBD, yang rencananya akan dilaksanakan sebanyak 145 unit di 20 desa dalam bentuk peningkatan kualitas tidak bisa dilaksanakan pembangunannya fisiknya. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/Covid-19/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 6 April 2020 dimana disampaikan untuk melakukan

penundaan sementara seluruh kegiatan fisik yang belum ada perikatan kontrak, kecuali yang sumber dananya bersifat terarah dan ada kepastian sumber dana akan terealisasi.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas, pelaksanaan penanganan RTLH melalui dana APBD hanya dilaksanakan sampai tahap penyusunan proposal Administrasi.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di 15 Desa

Peningkatan Kualitas (PK) yang dilaksanakan pada Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu menggunakan 2 sumber pendanaan, yaitu Cadangan DAK Perumahan dan BSPS dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana Cadangan DAK Perumahan.

Kegiatan ini dilakukan di 5 Desa yang termasuk dalam deliniasi Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yaitu : Desa Anturan, Desa Nagasepaha, Desa Sari Mekar, Desa Petandakan, dan Desa Poh Bergong dengan jenis bantuan berupa Peningkatan Kualitas rumah swadaya. Jumlah Pagu untuk Dana DAK Rp3.491.250.000,00 yang terdiri dari Belanja Fisik sebesar Rp. 3.377.500.000,00 untuk 193 unit dan Belanja Penunjang sebesar Rp. 113.750.000,00.

Tabel 18.

**Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan PK dengan Sumber DAK Tahun 2020**

No	Lokasi Kegiatan	Perencanaan		Realisasi	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu

1	Desa Anturan	38	665.000.000	38	665.000.000
2	Desa Nagasepaha	38	665.000.000	38	665.000.000
3	Desa Sari Mekar	39	682.500.000	39	682.500.000
4	Desa Petandakan	39	682.500.000	39	682.500.000
5	Desa Poh Bergong	39	682.500.000	39	682.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>3.377.500.000</b>	<b>193</b>	<b>3.377.500.000</b>

Realisasi jumlah bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan yang tertangani pada Tahun 2020 adalah 193 Unit ( 100%).

b. Peningkatan Kualitas (PK) dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler

Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Desa, dengan total 650 unit penerima bantuan dengan jenis bantuan berupa Peningkatan Kualitas rumah swadaya. Untuk kegiatan ini besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 17.500.000,00. dimana sudah termasuk anggaran untuk ongkos pekerja (maksimal 15 % dari bantuan). Jumlah Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.375.000.000,00.

Tabel 19.

**Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) dari Program BSPS Reguler Tahun 2020**

No	Lokasi Kegiatan	Perencanaan		Realisasi	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
1	Desa Bukti	51	892.500.000	51	892.500.000
2	Desa Bonthing	52	910.000.000	52	910.000.000

3	Desa Bondalem	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000
4	Desa Sembiran	53	927.500.000	53	927.500.000
5	Desa Penuktukan	113	1.977.500.000	113	1.977.500.000
6	Desa Sambirenteng	84	1.470.000.000	84	1.470.000.000
7	Desa Sudaji	30	525.000.000	30	525.000.000
8	Desa Kerobokan	37	647.500.000	37	647.500.000
9	Desa Galungan	30	525.000.000	30	525.000.000
10	Desa Tukad Sumaga	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>650</b>	<b>11.375.000.000</b>	<b>650</b>	<b>11.375.000.000</b>

Realisasi jumlah Bantuan rumah swadaya melalui BSPS Reguler yang tertangani pada Tahun 2020 adalah 650 Unit ( 100%).

- Permasalahan/ Kendala

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Buleleng, yaitu :

1. Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana APBD, yang rencananya akan dilaksanakan sebanyak 145 unit di 20 desa dalam bentuk peningkatan kualitas tidak bisa dilaksanakan pembangunan fisiknya. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/Covid-19/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 6 April 2020 dimana disampaikan untuk melakukan penundaan sementara seluruh kegiatan fisik yang belum ada perikatan kontrak, kecuali yang sumber dananya bersifat terarah dan ada kepastian sumber dana akan terealisasi. Berdasarkan Surat Edaran tersebut,

maka pelaksanaan penanganan RTLH melalui dana APBD hanya dilaksanakan sampai tahap penyusunan proposal Administrasi.

2. Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana DAK, pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana DAK sempat dihentikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Namun dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Poster dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 maka kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana DAK dilaksanakan kembali.
3. Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui Program BSPS, pelaksanaan kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan harus melaksanakan protokol kesehatan.

- Upaya pemecahan masalah/Solusi

Terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan bantuan rumah swadaya di Kabupaten Buleleng, dimana diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19, maka di ambil beberapa langkah dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya, semua pihak harus senantiasa mengikuti prosedur kesehatan penanganan Covid-19.
2. Memaksimalkan komunikasi melalui grup daring dalam proses koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan acara rapat dengan peserta dalam jumlah besar.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Tertanganinya rumah akibat bencana alam</i>				
2	Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	100	0	0

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penanganan rumah korban bencana alam yang siap huni adalah 0 % dengan predikat **Tidak Berhasil** diperoleh dari :

$$= \frac{\sum \text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun } n}{\sum \text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani tahun } n} \times 100 \%$$

$$= \frac{0}{82} \times 100 \%$$

$$= 0 \%$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam tahun anggaran 2020 pagu anggaran Rp. 141.681.800,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.681.704,- 99,999% dan realisasi fisik 100%. Realisasi fisik yang dimaksud disini adalah tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana yang telah selesai dilaksanakan, sedangkan untuk unit penanganan rumah korban bencana tidak terlaksana akibat refocusing anggaran akibat pandemi covid19.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdiri dari :

a) Pendampingan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam;

Adapun jenis pelayanan dasar dalam SPM perumahan rakyat sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana
- Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
- Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.

2) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana
- Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu :

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses

rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
  - 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.
  - 4) Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
  - 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;

3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m<sup>2</sup>/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun, sewa maupun rumah sewa umum.

Kegiatan pendampingan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam tahun 2020 direncanakan sejumlah 82 unit dengan pagu Rp. 650.000.000,- dengan rincian :

Tabel 20

**Rencana Kegiatan Fisik Tahun 2020**

No.	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020					
	JENIS KEGIATAN		SATUAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	<b>Lokasi</b>	<b>Unit</b>	<b>82</b>	<b>APBD</b>	<b>650.000.000</b>
		<b>Kec. Seririt</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>		<b>222.200.000</b>
		1. Desa Pangkung Paruk		9		63.200.000
		2. Desa Banjarasem		22		159.000.000
		<b>Kecamatan</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>		

	<b>Kubutambahan</b>				<b>16.000.000</b>
	1. Desa Tamblang		2		16.000.000
	<b>Kecamatan Grokgak</b>	<b>Unit</b>	<b>22</b>		<b>193.600.000</b>
	1. Desa Tukadsumaga		11		84.700.000
	2. Desa Sanggalangit		11		108.900.000
	<b>Kecamatan Sukasada</b>	<b>Unit</b>	<b>15</b>		<b>111.000.000</b>
	1. Desa Silangjana		15		111.000.000
	<b>Kecamatan Banjar</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>		<b>107.200.000</b>
	1. Desa Tampekan		3		29.700.000
	2. Desa Banjar		9		77.500.000

Tahapan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan pendampingan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam adalah :

Tabel 21

**Kegiatan Pendampingan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana**

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	7 s/d 14 Pebruari 2020	Perekrutan TFL	
2	5 maret 2020	Pengumuman TFL	
3	01 April 2020	Pelatihan dan Pembekalan TFL	Pembekalan mengalami perubahan jadwal karena berada pada awal pandemi.
	s/d 30 April 2020	Penugasan TFL	
		Verifikasi CPB	
		Sosialisasi Kegiatan rehabilitasi Rumah	
4	1 mei-29 mei 2020	Penyusunan Proposal	Kegiatan fisik tidak dapat dilakukan karena refocusing anggaran. Proposal disusun sebagai perencanaan kegiatan untuk tahun selanjutnya.
		penyusunan RAB	

Dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/COVID-19/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pekerjaan fisik program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditunda sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

- Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut secara umum disebabkan oleh faktor teknis yaitu :

1. Refocusing anggaran akibat adanya pandemi pada bulan Maret 2020;
2. Pekerjaan fisik sesuai Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/COVID-19/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Upaya Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan tersebut di atas telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan kegiatan pendampingan dan rehabilitasi rumah akibat bencana dilaksanakan dengan tetap berkontrak dengan TFL dan Korfes selama 2 bulan;
2. Adapun tugas dari TFL dan Korfes hanya selesai sampai tahap penyusunan proposal permohonan rehabilitasi rumah korban bencana;
3. Proposal tersebut akan digunakan dalam perencanaan dan diusulkan kembali tahun berikutnya.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</i>				
3	Persentase Kualitas Kawasan Permukiman	64,29	61,24	95,25

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase kualitas kawasan permukiman sebesar 95,25 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{permukiman kumuh yang tertangani}}{\Sigma \text{permukiman kumuh}} \times 100 \% \\
 &= \frac{58,02 \text{ Ha}}{94,75 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 61,24 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman tahun anggaran 2020 pagu anggaran Rp. 64.700,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.597.000,- 99,841 % dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat, belanja foto copy Rp. 3.000,- (0.464 % ) belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.100.000,- ( 10,819 %).

1. Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman

Kegiatan pokok peningkatan kualitas kawasan permukiman tahun anggaran 2020 terdiri dari :

- a) Koordinasi dengan pihak terkait penyusunan/penggabungan Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP) dengan Ranperda Pencegahan Kumuh dan Peningkatan Kualitas kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh ( RP2KPKPK)

- b) Luasan terduga kumuh di kelurahan kampung Baru yang disepakati Tim Pokja dan menjadi usulan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

No	Nama Kelurahan	RT –RW	Luas Kumuh	Ket
1.	Kel. Kampung Baru	Link. Kebon sari	5,20 ha	
		Link. Widya Sari	5,62 ha	
		<b>Total</b>	<b>10,82 ha</b>	

- c). Perhitungan pengurangan kumuh di wilayah Kabupaten Buleleng sesuai dengan SK Bupati Buleleng No. 050/309/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Buleleng, lokasi yang dipilih Desa Pengastulan, mengingat Desa Pengastulan merupakan bagian dari SK tersebut dan sudah dilakukan intervensi kegiatan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali (BPPW), luas Deliniasi kumuh yang tertangani di Desa Pengastulan 20,54 Ha.

- Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Dalam pengendalian perumahan dan permukiman diperlukan suatu instrument perangkat hukum guna menunjang kelancaran pekerjaan.

2) Kurangnya tenaga teknis lapangan yang bisa melakukan perhitungan pengurangan kumuh.

- Upaya Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan tersebut di atas telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Terhadap permasalahan pada point 1 , maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu akan mengajukan agar ranperda RP3KP dilegalisasi
- 2) Terhadap permasalahan pada point 2, berkoordinasi dengan askot KOTAKU dan POKJA PKP Kabupaten Buleleng
  - a) Melakukan koordinasi pelaksanaan pencegahan perumahan pada kawasan permukiman kumuh di bidang perumahan dan permukiman.

Dalam hal ini telah berkolaborasi dengan Tim POKJA PKP dan Kelurahan agar mengintervensi kawasan kumuh.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan</i>				
5	Persentase Pengelolaan RTH Publik Pada Kawasan Perkotaan	91,43	84,09	91,97

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase pengelolaan RTH publik pada kawasan perkotaan sebesar 91,97 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{ RTH publik yang dipelihara}}{\Sigma \text{ RTH publik yang tersedia}} \times 100\% \\
 &= \frac{8,72 \text{ Ha}}{10,37 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 84,09 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 350.033.900,00 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 338.307.856,00 (96,650%) dan realisasi fisik 96,65% serta sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 11.726.044,00 (3,35%) Kegiatan Pokok Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah pembangunan dan pendataan kualitas dan kuantitas taman-taman di kawasan perkotaan terdiri dari :

a. Penataan RTH Taman Bung Karno, berupa :

1) Review DED Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV

Review DED tahap IV merupakan review lanjutan terhadap Pembangunan Taman Bung Karno dilaksanakan dengan proses lelang dengan Konsultan pelaksana PT Mitra Trisakti alamat Jalan Buana raya gang Mega Buana no 11a padangsambian Denpasar dengan nilai penawaran sebesar Rp 139.315.000,00 pembayaran yang sudah dilaksanakan adalah sebesar 80% atau Rp 11.713.900,00 karena pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 akibat refocusing anggaran.

b. Penataan RTH Taman Ex. Bank Perniagaan Umum (Jl. Gajah Mada Singaraja), berupa :

1) Review DED RTH Taman Ex. Bank Perniagaan Umum (Jl. Gajah Mada Singaraja) tahap II

Penyusunan dokumen Perencanaan RTH Taman Ex. Bank Perniagaan Umum (Jl. Gajah Mada Singaraja) dilaksanakan dengan sistem pengadaan

langsung kepada CV. Manik Tri Bhuana, alamat : Jl. Kusuma Dewa Nomor 23 Denpasar (konsultan perencanaan) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar 59.500.000,00 pembayaran yang sudah dilaksanakan sebesar 80% atau Rp 47.600.000 karena pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan karena refokusing anggaran.

- Permasalahan yang dihadapi

Pelaksanaan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2020 tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya yaitu :

1. Belum tercapainya target pembangunan RTH Taman Bung Karno karena refokusing anggaran untuk penanganan Covid 19.
2. Belum tercapainya target pembangunan RTH Ex. Bank Perniagaan Umum tahap II karena refokusing anggaran untuk penanganan Covid 19
3. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, kawasan perkotaan harus menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan atau sebesar 832,78 Ha belum terpenuhi
4. Dalam pengelolaan luasan RTH publik kawasan perkotaan Singaraja masih belum mencapai target 100%, dikarenakan masih ada kawasan RTH yang masih tahap pembangunan dan sampai saat ini masih belum dapat dikelola dengan optimal.
5. Tahun 2021 kewenangan Pengelolaan RTH akan dilaksanakan oleh dinas Lingkungan Hidup

- Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, telah diambil langkah-langkah/upaya pemecahan masalah dan usulan/ saran sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV di usulkan pada RKA 2021 pada dinas Lingkungan Hidup
  2. Dalam rangka menambah jumlah/luasan RTH, diupayakan dengan cara pendataan luas RTH publik dan menginventarisasi lahan PEMKAB Buleleng dan lahan PEMPROV BALI yang belum dimanfaatkan di Kabupaten Buleleng dimohonkan untuk difungsikan sebagai RTH.
  3. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap tiap tahun sampai fisik mencapai 100%.
  4. Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dinas Lingkungan Hidup untuk keberlanjutannya seperti:Pembangunan Lanjutan RTH Taman Bung Karno dan Pembangunan Lanjutan RTH Ex bank Perniagaan Umum
2. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.987.779.500,00 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.956.925.854,00 (99,26%) dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 21.853.646,00 (0,74%). Kegiatan Pokok Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 adalah pemeliharaan taman-taman di kawasan perkotaan terdiri dari :

a. Belanja bahan/bibit tanaman (tanaman hias) , berupa :

Belanja Bahan/Material berupa Tanaman Hias pada tahun anggaran 2020 dilakukan sebanyak dua kali yaitu bulan Maret 2020 dan Oktober 2020. Pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan langsung kepada CV. Santosa, alamat : Jl. Yudistira No. 37. Tanaman yang diadakan dipergunakan sebagai tanaman penyulam pada taman-taman yang tanaman hiasnya hilang/dicuri/mati ataupun rusak.

b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum RTH, berupa :

Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum RTH berlokasi di Lapangan Ngurah Rai dan Pemeliharaan Taman Boulevard Kawasan Perkotaan berlokasi di Jl. Kartini dan Jl. Ahmad Yani . Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum RTH ini yaitu:

- Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum di Taman Kota Singaraja Kawasan Perkotaan Singaraja berupa :

Pemeliharaan Taman Kota berlokasi di Lapangan Ngurah Rai dengan melakukan perbaikan jogging track, perbaikan planter, perbaikan pintu rumah mesin pompa air dan penanaman/penggantian tanaman di area kolam Lapangan Ngurah Rai dan sekitarnya. Proses Pemeliharaan Taman Kota dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada CV. Kencana Sakti, alamat : Jl. Jelantik Gingsir Nomor 36 Singaraja, Kel. Sukasada Kec. Sukasada dengan waktu pelaksanaan mulai 2 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020.

- Pemeliharaan Taman Boulevard Kawasan Perkotaan, berupa :

Pelaksanaan pemeliharaan taman boulevard Tahun Anggaran 2020, dilakukan pemeliharaan taman yang berlokasi di Jl. Kartini dan Jl. Ahmad Yani dengan pekerjaan perbaikan pembatas taman. Proses Pemeliharaan Taman Boulevard

Kawasan Perkotaan dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada CV. Padma Asta Dala, alamat : Jl. Pulau Bali Gg 2 (pelaksana). Pemeliharaan Taman Boulevard Kawasan Perkotaan dilaksanakan mulai 2 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.

- Pemeliharaan Lampu dan Instalasi Listrik RTH, Berupa :

Pelaksanaan pemeliharaan lampu dan instalasi listrik Tahun Anggaran 2020, dilakukan pemeliharaan lampu yang berlokasi di Jl. Ponogoro, Jl. Dewi Sartika, Jl. Udayana, Taman Yuwana Asri, Taman Bung Karno dan Taman Kota Ngurah Rai. Proses Pemeliharaan lampu dan instalasi listrik dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung kepada PT. Krisna Aditya Darma, alamat : Jl. Udayana No. 15 A (pelaksana). Pemeliharaan lampu dan instalasi listrik Kawasan Perkotaan.

- Permasalahan yang dihadapi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2020 tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya yaitu :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga keindahan taman (pencurian tanaman, perusakan taman oleh oknum dan binatang peliharaan);
- b. Kurangnya standar teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeliharaan taman.

- Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, telah diambil langkah-langkah/upaya pemecahan masalah dan usulan/ saran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap taman serta menanam jenis bibit tanaman yang umum dan melakukan pembibitan mandiri di beberapa lokasi/taman untuk mengganti tanaman yang mati.
  - b. Membuat kajian sebagai pendekatan acuan pelaksanaan pemeliharaan taman.
3. Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 856.380.000,00 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 839.380.000,00 (98,02%) dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 16.969.676,00 (1,98%).

Kegiatan Pokok Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 adalah mengadakan dan pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan taman di kawasan perkotaan terdiri dari :

- a) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, berupa :

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah peralatan sebanyak 32 jenis peralatan kebersihan. Proses pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada CV. WIRA KARYA MITRA, alamat Jln. Jelantik Gingsir No. 129, Lingk. Bantang Banua, Kel. Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng. Seluruh peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan didistribusikan ke masing-masing pengawas lapangan;

- b) Belanja Bahan Saprodi, berupa :

Pengadaan bahan saprodi antara lain : Pupuk An Organik sebanyak 1.00 kg, Media Tumbuh Top Soil sebanyak 63 m<sup>3</sup>, Pestisida sebanyak 16 liter (Lamda Sihalotrin sebanyak 5 Liter, Profenofos sebanyak 5 Liter, Fenfoat sebanyak 6 Liter), Polybag sebanyak 6.000 buah dan Paranet sebanyak 250 meter. Proses pengadaan dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada CV. Karya Merta Wangi, alamat : Ds. Sudaji Kec. Sawan. Semua bahan saprodi diaplikasikan ke taman kawasan perkotaan Singaraja secara berkala;

c) Belanja Cetak Baliho, berupa :

Pengadaan cetak baliho sebanyak 30 buah cetak baliho 4x3 cm, dipasang pada rangka yang sudah ada di Jl. A. Yani Barat, A. Yani Timur dan Jl. Gajah Mada sebagai pengganti baliho lama yang sudah rusak dan pudar. Proses pengadaan cetak baliho dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada Hope Braindustri, alamat Jln. Singaraja-Lovina, Ds.Tukadmungga;

d) Belanja Pakaian Kerja Lapangan, berupa :

Pengadaan pakaian kerja lapangan berupa kaos berkerah lengan panjang untuk para tenaga harian lepas (THL) taman sebanyak 150 buah.. Proses pengadaan pakaian kerja lapangan dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung kepada ROMPIES BALI, alamat Br. Dinas Insaka, Ds. Pedawa, Kec. Banjar Kab. Buleleng;

e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan, berupa :

Pemeliharaan prasarana kebersihan meliputi pemeliharaan mesin chain saw dan pemeliharaan mesin rumput gendong, proses pemeliharaan dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung kepada UD. Panji Teknik, alamat Jln. A. Yani Barat No. 188B Singaraja. Pemeliharaan tersebut meliputi service ringan

dan bongkar pasang suku cadang mesin chain saw dan mesin potong rumput gendong;

f) Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset/Pompa; dan

Pengadaan mesin genset/pompa berupa 1 unit mesin pompa air type Shimizu. Proses pengadaan mesin pompa air dengan sistem pengadaan langsung kepada UD. SURYA INDAH, alamat Jl. Pramuka No. 18 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Peralatan mesin pompa air sudah digunakan dan dipakai di area kantor untuk menunjang pengaliran air sumur kantor.

g) Pengadaan Peralatan Kebersihan/ Pertamanan, berupa :

Pengadaan peralatan kebersihan/pertamanan berupa 4 unit mesin chain saw type MS 250. Proses pengadaan mesin chain saw dengan sistem pengadaan langsung kepada UD. SURYA INDAH, alamat Jl. Pramuka No. 18 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Peralatan mesin chain saw sudah digunakan oleh THL/tenaga lapangan pemangkasan pohon untuk pemeliharaan RTH.

- Permasalahan yang dihadapi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2020 tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya yaitu :

1. Faktor teknis yaitu jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih seperti sapu lidi taman, cangkul, sabit, dll. kurang/tidak sesuai dengan perencanaan/perkiraan.
2. Biaya pemeliharaan kendaraan operasional seperti Truk pemangkas terus meningkat, sehingga kurang efektif dan efisien, selain itu kendaraan yang ada masih belum bisa mengimbangi kebutuhan/pelayanan terhadap masyarakat.

- Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah diambil langkah-langkah/upaya pemecahan masalah dan usulan/ saran sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang akan datang perlu dilakukan perencanaan yang lebih cermat, memperhitungkan frekuensi penggunaan dan kualitas barang sehingga sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengusulan penambahan kendaraan roda 6 truk pemangkas/skylift, untuk pemangkasan rutin dan memenuhi banyaknya permohonan masyarakat untuk pemangkasan pohon di kawasan perkotaan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan</i>				
5	Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\Sigma \text{ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{ Permohonan penataan penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \% \\
 & \frac{6 \text{ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah}}{6 \text{ Permohonan penataan penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \% \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pendampingan penyelenggaraan pengadaan tanah.

1. Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.140.000,00,- realisasi keuangan mencapai Rp. 53.137.920.00,- (99,996%).

Adapun kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terfasilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Permohonan rekomendasi peralihan Hak atas tanah oleh Mahesh Gagandas Lalmalani di Desa Pancasari;
- b. Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- c. Ikut dalam Kelompok Kerja Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

2. Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah pada tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.195.800,00,- realisasi keuangan mencapai Rp. 23.195.272.00,- (99,998%).

Adapun kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mendampingi permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Titab, Kabupaten Buleleng;

- b. Memfasilitasi Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Taman Wisata di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
  - c. Memfasilitasi dan Mendampingi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru BTS. Kota Singaraja-Mengwitani Tahap 2.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
1. Terlaksananya kerjasama yang baik antara Instansi yang memerlukan tanah dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  2. Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan pemanfaatan tanah.
- Permasalahan yang dihadapi
1. Adanya situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anggaran tahun 2020 di fokuskan untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19, sehingga kegiatan fasilitasi dan sosialisasi sedikit terhambat.
- Upaya yang dilakukan
1. Menggunakan sistem fasilitasi online “SINGADUTA” untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan fasilitasi. Dengan sistem tersebut masyarakat dapat mengajukan permohonan dari rumah secara daring/online.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan</i>				
6	Prosentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{Penyelesaian konflik pertanahan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Permohonan penyelesaian konflik pertanahan}} \times 100 \% \\ &= \frac{4 \text{ Kasus}}{4 \text{ Kasus}} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan pada tahun 2020 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 21.734.800,00,- realisasi keuangan mencapai Rp. 21.730.240,00,- (99,979 %) Adapun konflik pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya adalah :

1. Pendampingan fasilitasi lanjutan atas Konflik Tanah sengketa Eks HGU No 1 PT. Margarana di Desa Pemuteran, Eks HGU 2 dan 3 di Desa Sumberklampok dan Eks HGU No. 1 PT. Dharmajati di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
  2. Pendampingan fasilitasi terkait Perpanjangan Eks HGU No I Desa Sepang yang diajukan oleh PD. Swatantra Kabupaten Buleleng.
  3. Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah di SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
  4. Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
  5. Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bersama Instansi terkait dengan bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator
  2. Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan konflik-konflik pertanahan
- Permasalahan yang dihadapi
1. Khusus sengketa terkait Eks HGU 1,2 dan 3 di Desa Sumberklampok merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dimana penyelesaian sengketa pada Eks HGU tersebut saat ini masih dalam proses pensertifikatan yang mana dari lahan seluas ±600 Ha, sudah digunakan oleh masyarakat sebagai pemukiman ±65,5 Ha dan ±10 Ha lainnya sudah digunakan sebagai fasilitas umum termasuk jalan serta fasilitas sosial, sehingga lahan yang tersisa 514 Ha.
  2. Pihak Pemerintah Provinsi Bali dan Warga Sumberklampok sepakat untuk membagi sisa lahan Eks HGU 1, 2 dan 3 yang seluas 514,2 Ha, disepakati pembagian 70% bagi Warga Sumberklampok dengan luas 359,80 Ha dan 30% bagi Pemerintah Provinsi Bali dengan luas 154,20 Ha. Untuk perpanjangan Eks HGU No I Desa Sepang yang diajukan oleh PD. Swatantra, HGU tersebut sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.
  3. Untuk sengketa tanah SDN 2 Sambangan, status tanah yang dijadikan obyek sengketa belum ada bukti kepemilikan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
  4. Untuk sengketa tanah Desa Adat Buleleng, tanah desa adat yang diajukan untuk disertifikatkan melalui program PTSL di klaim oleh Ahli Waris Puri Buleleng.
  5. Belum adanya lahan pengganti dari Pemerintah Provinsi Bali kepada warga terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok.

- Upaya yang dilakukan

1. Untuk Permasalahan di Sumberklampok, Disperkimta tetap melakukan koordinasi dalam fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk proses penyelesaian sengketa.
2. Terkait permohonan fasilitasi PD. Swatantra, Disperkimta melakukan fasilitasi terhadap para pihak dan pengumpulan berkas sebelumnya untuk selanjutnya melakukan identifikasi lapangan/obyek HGU.
3. Terkait sengketa SDN 2 Sambangan, Disperkimta melakukan koordinasi kepada para pihak khususnya perbekel, perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Sambangan.
4. Terkait Sengketa tanah Desa Adat Buleleng, Disperkimta melakukan koordinasi kepada Kelian Desa Adat Buleleng dan para pihak terkait sebagai dasar saran/langkah mediasi selanjutnya.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
<i>Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan</i>				
7	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Dokumen yang disusun}}{\Sigma \text{Dokumen pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal pada tahun 2020 jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 45.998.900,00,- realisasi keuangan mencapai Rp. 45.997.072,00,- (99,996 %) dokumen yang disusun sesuai target adalah dokumen tanah ulayat/tanah desa adat Adapun tanah ulayat/tanah desa adat yang telah terdata, terinventarisasi adalah sebagai berikut :

1. Data Tanah Ulayat/ Tanah Desa Adat

Tabel 22  
Data Tanah Ulayat

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa Adat	Luas (m2)	JUMLAH REALISASI	Keterangan
1	Gerokgak	Desa Patas	Desa Pakraman Patas	14.350	4	
		Desa Celukan Bawang	Desa Pakraman Celukan Bawang	2.420	3	
		Desa Banyupoh	Desa Pakraman Banyupoh	38.230	6	
		Desa Pejarakan	Desa Pakraman Pejarakan	56.521	11	
		Desa Gerokgak	Desa Pakraman Gerokgak	35.985	36	
		Desa Sumberklompok	Desa Pakraman Sumberklompok			Tahun 2021
		Desa Pengulon	Desa Pakraman Pengulon	32.486	8	
		Desa Musi	Desa Pakraman Musi	5.280	4	
		Desa Tukad Sumaga	Desa Pakraman Tukad Sumaga	11.165	7	
		Desa Sanggalangit	Desa Pakraman Sanggalangit	34.140	9	
		Desa Tinga-Tinga	Desa Pakraman Tinga-Tinga	2.380	2	
		Desa Penyabangan	Desa Pakraman Penyabangan	7.395	4	
		Desa Pemuteran	Desa Pakraman Pemuteran	110.710	7	
		Desa Sumberkima	Desa Pakraman Sumberkima	132.525	24	
Luas Se-Kecamatan			<b>483.587</b>	<b>125</b>		
2	Seririt	Desa Pangkung Paruk	Desa Pakraman Pangkung Paruk	1.500	1	
		Desa Mayong	Desa Pakraman Mayong			Tahun 2021
		Desa Ularan	Desa Pakraman Ularan			Tahun 2021
		Desa Unggahan	Desa Pakraman Unggahan	12.860	6	
		Desa Umeanyar	Desa Pakraman Ume Anyar	24.960	6	
		Desa Kalisada	Desa Pakraman Tegalenga	22.400	22	
			Desa Pakraman Kalisada	13.700	7	
		Desa Bubunan	Desa Pakraman Bubunan	399.759	385	
		Kelurahan Seririt	Desa Pakraman Seririt	3.285	4	
		Desa Bestala	Desa Pakraman Bestala	3.555	6	
		Desa Sulanyah	Desa Pakraman Sulanyah	4.730	4	
		Desa Rangdu	Desa Pakraman Rangdu	8.100	1	
		Desa Tanguwisia	Desa Pakraman Tanguwisia	2.140	1	
		Desa Patemon	Desa Pakraman Patemon	44.447	210	
		Desa Lokapaksa	Desa Pakraman Lokapaksa	16.020	102	
		Desa Ringdikit	Desa Pakraman Ringdikit	66.591	430	
		Desa Banjar Asem	Desa Pakraman Yeh Anakan			Dalam Proses
			Desa Pakraman Kalang Anyar	5.322	5	
			Desa Pakraman Banjar Asem	72	1	
		Desa Joanyar	Desa Pakraman Joanyar Kajianan			Tahun 2021
			Desa Pakraman Joanyar Kelodan			Tahun 2021
		Desa Pengastulan	Desa Pakraman Pengastulan			Tahun 2021
		Desa Gunung Sari	Desa Pakraman Tunju	7.935	3	
Desa Kalianget	Desa Pakraman Kalianget	20.850	3			
Desa Munduk Bestala	Desa Pakraman Munduk Bestala	4.345	7			
Luas Se-Kecamatan			<b>662.571</b>	<b>1204</b>		

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

3	Busungbiu	Desa Telaga	Desa Pakraman Telaga	4.875	5	
		Desa Tista	Desa Pakraman Tista	9.705	5	
			Desa Pakraman Munduk Mengenu	2.120	3	
			Desa Pakraman Munduk Tengah	30.505	8	
		Desa Umejero	Desa Pakraman Umejero	57.285	218	
		Desa Tinggarsari	Desa Pakraman Tinggarsari	46.965	145	
		Desa Titab	Desa Pakraman Titab	6.900	4	
		Desa Subuk	Desa Pakraman Subuk	20.955	71	
		Desa Busungbiu	Desa Pakraman Busungbiu	118.873	732	
		Desa Pelapuan	Desa Pakraman Pelapuan	76.444	298	
		Desa Sepang	Desa Pakraman Sepang	3.330	3	
		Desa Bengkel	Desa Pakraman Bengkel	28.485	8	
		Desa Puncak Sari	Desa Pakraman Puncak Sari	45.490	13	
		Desa Bongancina	Desa Pakraman Bongancina	9.520	11	
		Desa Kedis	Desa Pakraman Kedis	47.945	188	
Desa Kekeran	Desa Pakraman Kekeran	71.802	389			
Luas Se-Kecamatan			<b>581.199</b>	<b>2101</b>		
4	Banjar	Desa Gesing	Desa Pakraman Gesing	7.405	6	
		Desa Pedawa	Desa Pakraman Pedawa	21.613	7	
		Desa Munduk	Desa Pakraman Munduk	21.995	6	
		Desa Banjar Tegeha	Desa Pakraman Banjar Tegeha	28.733	173	
		Desa Dencarik	Desa Pakraman Dencarik	82.765	383	
		Desa Gobleg	Desa Pakraman Gobleg			Dalam Proses
		Desa Banjar	Desa Pakraman Banjar	73.384	187	
		Desa Banyuseri	Desa Pakraman Banyuseri	1.880	4	
		Desa Cempaga	Desa Pakraman Cempaga	287.895	25	
		Desa Tirta Sari	Desa Pakraman Tirta Sari			Tahun 2021
		Desa Kaliasem	Desa Pakraman Kaliasem	10.050	4	
		Desa Sidetapa	Desa Pakraman Sidetapa	1.117.701	478	
		Desa Tigawasa	Desa Pakraman Tigawasa	14.620	18	
		Desa Temukus	Desa Pakraman Temukus	13.585	7	
		Desa Banyuatis	Desa Pakraman Banyuatis			Tahun 2021
Desa Kayu Putih	Desa Pakraman Kayu Putih	70.642	231			
Desa Tampekan	Desa Pakraman Tampekan	15.457	75			
Luas Se-Kecamatan			<b>1.767.725</b>	<b>1604</b>		
5	Sukasada	Desa Gitgit	Desa Pakraman Gunung Luwih	57.215	19	
			Desa Pakraman Pumahan	6.700	3	
		Desa Wanagiri	Desa Pakraman Wanagiri	1.360	1	
		Desa Pancasari	Desa Pakraman Pancasari	15.345	8	
		Desa Pegayaman	Desa Pakraman Pegayaman	7.000	2	
		Desa Padangbulia	Desa Pakraman Padangbulia			Dalam Proses
		Desa Selat	Desa Pakraman Selat	12.350	4	
		Desa Ambengan	Desa Pakraman Ambengan	183.658	23	
		Desa Panji	Desa Pakraman Panji	41.235	18	
		Desa Pegadungan	Desa Pakraman Pegadungan	10.950	11	
			Desa Pakraman Pasut Katiasa	35.010	7	
			Desa Pakraman Batu Dinding	1.805	3	
		Kelurahan Sukasada	Desa Pakraman Sangket	8.060	8	
			Desa Pakraman Lumbanan	1.736	3	
			Desa Pakraman Sukasada			Tahun 2021
Desa Sambangan	Desa Pakraman Sambangan	15.690	9			
Desa Tegalinggah	Desa Pakraman Munduk Kunci	16.985	4			
	Desa Pakraman Mujung Sari Kerthi	450	1			
Desa Silangjana	Desa Pakraman Silangjana			Tahun 2021		
Desa kayu Putih	Desa Pakraman Kayu Putih	24.660	4			
	Desa Pakraman Sinalud	26.353	7			
Luas Se-Kecamatan			<b>466.562</b>	<b>135</b>		

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

6	Buleleng	Kecamatan Buleleng	Desa Pakraman Buleleng	107.491	534	
		Desa kalibukbuk	Desa Pakraman Kalibukbuk	25.455	37	
			Desa Pakraman Banyualit	59.270	108	
		Desa Jinengdalem	Desa Pakraman Alapsari	24.690	166	
		Desa Nagasepeha	Desa Pakraman Nagasepeha	37.674	207	
		Desa Sari Mekar	Desa Pakraman Runuh	11.135	7	
		Desa Poh Bergong	Desa Pakraman Poh Bergong	6.265	3	
		Kelurahan Penarukan	Desa Pakraman Penarukan	117.160	45	
		Desa Pengelatan	Desa Pakraman Penglatan			Dalam Proses
		Desa Tukadmungga	Desa Pakraman Dharmajati	91.645	355	
		Desa Anturan	Desa Pakraman Anturan	18.190	7	
		Desa Alasangker	Desa Pakraman Tenaon	59.060	12	
		Desa Petandakan	Desa Pakraman Petandakan	13.625	44	
		Desa Banyuning	Desa Pakraman Banyuning	81.280	414	
			Desa Pakraman Padang Keling	12.685	35	
		Kelurahan Banyuasri	Desa Pakraman Banyuasri	44.847	164	
		Desa Baktiseraga	Desa Pakraman Tista			Dalam Proses
			Desa Pakraman Bangkang			Dalam Proses
		Kelurahan	Desa Pakraman Beratan Samayaji	21.685	32	
		Desa Pamaron	Desa Pakraman Pamaron	40.849	172	
Luas Se-Kecamatan			<b>773.006</b>	<b>2342</b>		
7	Sawan	Desa Menyali	Desa Pakraman Menyali	146.100	27	
		Desa Sudaji	Desa Pakraman Sudaji			Dalam Proses
		Desa Suwug	Desa Pakraman Suwug			Dalam Proses
		Desa Kerobokan	Desa Pakraman Kerobokan			Tahun 2021
			Desa Pakraman Kloncing			Tahun 2021
		Desa Sangsit	Desa Pakraman Sangsit Dangin Yeh			Dalam Proses
			Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh	199.980	1145	
		Desa Bungulan	Desa Pakraman Bungulan	20.653	159	
			Desa Pakraman Sari Besikan	15.752	109	
		Desa Jagaraga	Desa Pakraman Jagaraga			Tahun 2021
		Desa Sawan	Desa Pakraman Sawan			Tahun 2021
		Desa Bebetin	Desa Pakraman Bebetin	31.300	11	
		Desa Sekumpul	Desa Pakraman Sekumpul	6.830	2	
			Desa Pakraman Lebah Sekumpul			Tahun 2021
		Desa Galungan	Desa Pakraman Galungan	28.750	5	
		Desa Lemukih	Desa Pakraman Lemukih	119.690	10	
Desa Pakraman Manuksesa	5.813		6			
Desa Sinabun	Desa Pakraman Sinabun	10.136	6			
Luas Se-Kecamatan			<b>585.004</b>	<b>1480</b>		
		Desa Bengkala	Desa Pakraman Bengkala	176.789	110	
		Desa Bukti	Desa Pakraman Bukti	92.696	147	
			Desa Pakraman Sanih	632.930	64	
		Desa Tamblang	Desa Pakraman Tamblang	6.047	344	
			Desa Pakraman Tangkid	30.745	124	
			Desa Pakraman Klampauk	11.130	49	
		Desa Kubutambahan	Desa Pakraman Kubutambahan	929.363	268	
		Desa Mengening	Desa Pakraman Mengening	2.500	2	
		Desa Bila	Desa Pakraman Bila Tua	4.380	6	
			Desa pakraman Bila Bajang	69.735	17	

8	Kubutambahan	Desa Tajun	Desa Pakraman Tajun	71.451	228	
			Desa Pakraman Bayad	161.945	27	
		Desa Tunjung	Desa Pakraman Tunjung	13.945	6	
		Desa Depeha	Desa Pakraman Depeha	2.115	3	
		Desa Pakisan	Desa Pakraman Pakisan	43.270	8	
			Desa Pakraman Sangburni			Tahun 2021
			Desa Pakraman Klandis	59.140	7	
		Desa Bulian	Desa Pakraman Bulian	10.778	68	
		Desa Tambakan	Desa Pakraman Tambakan	5.130	34	
		Desa Bonthing	Desa Pakraman Bonthing	41.637	366	
			Desa Pakraman Rendetin	34.670	52	
Luas Se-Kecamatan			<b>2.411.558</b>	<b>1949</b>		
9	Tejakula	Desa Pacung	Desa Pakraman Pacung	24.200	111	
			Desa Pakraman Bangkah	139.565	97	
		Desa Tembok	Desa Pakraman Tembok	9.310	4	
			Desa Pakraman Ngis	3.715	6	
		Desa Sambirenteng	Desa Pakraman Sambirenteng	31.995	227	
			Desa Pakraman Geretek	24.150	6	
		Desa Tejakula	Desa Pakraman Tejakula	92.285	31	
		Desa Madenan	Desa Pakraman Madenan	4.475	4	
			Desa Pakraman Sangambu	6.460	8	
			Desa Pakraman Gentuh	47.155	90	
		Desa Sembiran	Desa Pakraman Sembiran	47.045	32	
		Desa Sembiran	Desa Pakraman Sembiran	35.794	303	
		Desa Julah	Desa Pakraman Julah	110.944	926	
		Desa Bondalem	Desa Pakraman Bondalem	197.524	800	
Desa Les	Desa Pakraman Les Penuktukan	69.577	205			
Luas Se-Kecamatan			<b>844.194</b>	<b>2850</b>		
Luas Total			<b>8.575.406</b>	<b>13790</b>		

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Terlaksananya kerjasama yang baik antara Camat, Desa/Kelurahan, Klian Majelis Madya Desa Pakraman, Klian Majelis Alit Desa Pakraman, dan Klian Desa Pakraman dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendata, menginventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

- Permasalahan yang dihadapi

1. Pergantian atau masa transisi Bendesa Adat sehingga belum ada penyerahan aset dari pejabat lama kepada pejabat baru.
2. Sertifikat tanah pekarangan desa yang dimanfaatkan oleh krama desa sudah di serahkan langsung oleh kelian dusun dan tidak difotocopy atau diarsip.
3. Belum mempunyai data aset tanah yang valid karena masih berkoordinasi dengan Desa Dinas dan tokoh masyarakat.
4. Masih adanya kekhawatiran dalam hal pembayaran pajak.
5. Belum adanya kesepakatan antara Bendesa Adat, Krama Desa dan Desa Dinas mengenai keikutsertaan dalam program PTSL.

- Upaya yang dilakukan

1. Perlu di adakan survey/ pendataan kembali dan klarifikasi terhadap data tanah desa pakraman sehingga data yang di peroleh lebih valid dan akurat, agar berkordinasi dengan desa dinas untuk membantu dalam hal administrasi.
2. Melakukan koordinasi antara Desa Dinas dan Desa Adat agar dapat menetapkan data aset yang valid sehingga status kepemilikan tanah menjadi jelas.
3. Terkait kekhawatiran dalam hal pembayaran pajak, Disperkimta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.
4. Disperkimta melakukan sosialisai/paruman kembali antara Bendesa Adat, Krama Desa dan Desa Dinas mengenai keikutsertaan program PTSL (Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap).

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

Dibentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Januari tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana sebelum terjadi perubahan kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 bernama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2020 merupakan tahun ke 3 periode RPJMD 2017-2022 sehingga pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan dengan tahun lalu (2019) dapat dibandingkan sebagai berikut : pada tahun 2019 target kinerja tahunan sebesar 68,67% realisasi 68,13% dengan capaian sebesar 99,21%, sedangkan pada tahun 2020 target kinerja tahunan sebesar 64,90% realisasi 54,80% dengan capaian kinerja sebesar 84,44%. Adanya penurunan target dikarenakan adanya pemindahan sub urusan sanitasi pada tahun 2020 ke Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Hal ini dijelaskan pada Renstra Revisi Tahun 2017-2022 yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Formulasi dari Indikator kinerja tahunan adalah dari perhitungan rata-rata capaian indikator program pengembangan perumahan dengan capaian indikator program lingkungan sehat perumahan, sehingga dengan adanya pemindahan sub urusan sanitasi maka target kinerja tahunan hanya mengambil dari target program pengembangan perumahan saja. Adanya perbandingan yang menurun capaian kinerja tahunan tahun 2019 sebesar 99,21% dan capaian kinerja tahunan tahun 2021 sebesar 84,44% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid19 dimana anggaran difokuskan untuk fokus menangani pandemi covid 19 sehingga untuk penanganan RTLH yang menjadi indikator capaian kinerja tahunan

tahun 2020 penanganan RTLH hanya besumber dari dana DAK sehingga secara otomatis volume penanganan RTLH terbatas hanya dari DAK saja.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang standard pelayanan minimal (SPM) bahwa, SPM ditetapkan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Tabel 23

#### **Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		REALISASI
	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	2020
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	0 %

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 diperoleh dari :

1. Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah}}{\sum \text{total rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{0 \text{ unit}}{0 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Tahun 2020 tidak ada rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sehingga capaian SPM tahun 2020 untuk indikator SPM persentase terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 0%.

2. Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100 \% \\ &= \frac{0 \text{ unit}}{82 \text{ unit}} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/COVID-19/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pekerjaan fisik program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditunda sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Sehingga capaian SPM tahun 2020 untuk

indikator SPM Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana 0%.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 realisasi anggaran yang digunakan guna untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.656.737.793,00,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah ), dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 27.304.200,00,-
- Belanja barang /jasa Rp. 10.138.527.193,00,-
- Belanja Modal Rp. 490.906.400,00,-

Realisasi anggaran pada per 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 10.534.208.443,00,- (Sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 98.85% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 27.304.200,00,-
- Belanja barang /jasa Rp. 10.036.552.768,00,-
- Belanja Modal Rp. 470,351,475,00,-

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 21**  
**Realisasi Keuangan Capaian Program**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Capaian Keuangan (%)</b>
1	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR	a. Pengembangan Perumahan	3.843.689.800,-	3.801.320.492,-	98.89
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	64.700.000,-	64.597.000,-	99.84
3	Tertanganinya rumah akibat bencana alam	c. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	141.681.800,-	141.681.704,-	99,99
4	Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan	d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan	4.185.193.400,-	4.134.644.034,-	98.79
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan	e. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	76.335.800,-	76,333,192,-	99.99
6	Menurunnya konflik pertanahan	f. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	21.734.800,-	21.730.240 ,-	99,97
7	Meningkatnya informasi pertanahan	g. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	45.998.900,-	45.997.072 ,-	99,99

Realisasi kegiatan/capaian keuangan kegiatan berdasarkan sasaran program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

No.	Sasaran Strategis dan Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR</i>				
	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.756.909.000,-	3,714,603,812,-	98.87
		2. Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	86.780.800,-	86.716.680,-	99,23
2	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</i>				
	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman	64.700.000,-	64.597.000,-	92,73
3	<i>Sasaran : Tertanganinya rumah akibat bencana alam</i>				
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	4. Pendampingan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	141.681.800,-	141.681.704,-	99,99
4	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan</i>				
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan	5. Penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	350.033.900,-	338.307.856,-	96.65

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

		6. Pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	2.978.779.500,-	2.956.925.854,-	99.26
		7. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	856.380.000,-	839.410.324,-	93.84
5	<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan</i>				
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	53.140.000,-	53.137.920 ,-	99,996
		9. Pendampingan penyelenggaraan pengadaan tanah	23.195.800,-	23.195.272 ,-	99,998
6	<i>Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan</i>				
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	10. Pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	21.734.800,-	21.730.240 ,-	99,979

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*

---

7	<i>Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan</i>				
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	11. Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	45.998.900,-	45.997.072 ,-	99,996

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun demikian terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai karena adanya pandemi covid 19 sehingga terjadi refocusing anggaran.. Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.



**LAMPIRAN LKjIP TAHUN 2020**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN BULELENG**



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 800 /362 / I / 2020  
TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing bidang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan / perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 15 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Nyoman Surattini, ST.**  
Regina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670102 199803 2 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Buleleng
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng di Buleleng
8. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULELENG  
PERIODE 2017 - 2022**

**Tugas Pokok** : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan.

**Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Keterangan
		Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.	Amanat UU Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman, sehat dan harmonis dan berkelanjutan.	Jumlah dari perhitungan capaian persentase masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak huni.  $= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	Capaian indikator kinerja utama diperoleh dari capaian program pengembangan perumahan

Singaraja, 15 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Nyoman Surattini, ST.**  
Gembina Tk.I (IV/b)  
19670102 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JALAN TELENG No. 1 BANYUASRI TELEPON (0362) 21843 SINGARAJA  
Website : [disperkimta.bulelengkab.go.id](http://disperkimta.bulelengkab.go.id) e-mail : [disperkimta@bulelengkab.go.id](mailto:disperkimta@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Surattini, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 14 Oktober 2020

  
**PIHAK KEDUA,**  
Putu Agus Suradnyana, ST

  
**PIHAK PERTAMA,**  
Ni Nyoman Surattini, ST  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19670102 199803 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	- Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	64,90%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	- Predikat LAKIP	A

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.509.021.693,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 550.614.600,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 28.710.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 92.977.500,00	APBD
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD	Rp. 96.079.500,00	APBD
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.843.689.800,00	APBD
7. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Rp. 141.681.800,00	APBD
8. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Rp. 64.700.000,00	APBD
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Rp. 4.185.193.400,00	APBD
10. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 76.335.800,00	APBD
11. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp. 21.734.800,00	APBD
12. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 45.998.900,00	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 10.656.737.793,00</b>	



Singaraja, 14 Oktober 2020  
 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Kabupaten Buleleng

Ni Nyoman Surattini, ST  
 Pembina TK.I (IV/b)  
 NIP. 19670102 199803 2 003

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Sasaran Strategis</b>														
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	- Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	%	64,90	Triwulan I	10,00%	10,00%	100,00%	Perekrutan tenaga fasilitator lapangan untuk program APBD dan Penyusunan proposal program BSPS.	3.843.689.800	Triwulan I	76.309.800	48.473.200	63,52%	
					Triwulan II	20,00%	20,00%	100,00%	Penyusunan proposal bantuan rumah swadaya melalui program APBD sudah terlaksana dan proses tanda tangan buku tabungan untuk program BSPS.		Triwulan II	209.129.800	149.238.404	71,36%	
					Triwulan III	40,00%	41,75%	104,38%	Program BSPS sebanyak 550 unit sudah tuntas, Program BSPS Desa Tukadsumaga sebanyak 100 unit masih dalam tahap pembangunan dan Program DAK sebanyak 193 unit dalam tahap penyelesaian proposal.		Triwulan III	3.715.759.800	238.837.918	6,43%	
					Triwulan IV	64,90%	54,80%	84,44%	Peningkatan Kualitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler sebanyak 650 unit dan Program Peningkatan Kualitas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 193 telah selesai dilakukan.		Triwulan IV	3.843.689.800	3.801.320.492	98,90%	
<b>TOTAL</b>										<b>3.843.689.800,00</b>		<b>3.843.689.800</b>	<b>3.801.320.492</b>	<b>98,90%</b>	
	<b>Sasaran Program</b>														
1.	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR	- Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	%	64,90	Triwulan I	10,00%	10,00%	100,00%	Perekrutan tenaga fasilitator lapangan untuk program APBD dan Penyusunan proposal program BSPS.	3.843.689.800	Triwulan I	76.309.800	48.473.200	63,52%	
					Triwulan II	20,00%	20,00%	100,00%	Penyusunan proposal bantuan rumah swadaya melalui program APBD sudah terlaksana dan proses tanda tangan buku tabungan untuk program BSPS.		Triwulan II	209.129.800	149.238.404	71,36%	

					Triwulan III	40,00%	41,75%	104,38%	Program BSPS sebanyak 550 unit sudah tuntas, Program BSPS Desa Tukadsumaga sebanyak 100 unit masih dalam tahap pembangunan dan Program DAK sebanyak 193 unit dalam tahap penyelesaian proposal.		Triwulan III	3.715.759.800	238.837.918	6,43%	
					Triwulan IV	64,90%	54,80%	84,44%	Peningkatan Kualitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler sebanyak 650 unit dan Program Peningkatan Kualitas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 193 telah selesai dilakukan.		Triwulan IV	3.843.689.800	3.801.320.492	98,90%	
2.	Tertanganinya rumah akibat bencana alam	-	Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	%	100	Triwulan I	10,00%	0,00%	0,00%	Perekrutan tenaga fasilitator lapangan dan kordinator fasilitator untuk program rehabilitasi rumah korban bencana dan Penyusunan proposal program rehabilitasi rumah korban bencana.	141.681.800	Triwulan I	30.152.500	20.259.800	67,19%
					Triwulan II	20,00%	0,00%	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana.		Triwulan II	79.851.800	70.628.372	88,45%	
					Triwulan III	60,00%	0,00%	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana telah selesai dilakukan.		Triwulan III	110.766.800	97.611.704	88,12%	
					Triwulan IV	100,00%	0,00%	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana telah selesai dilakukan. Dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/COVID-19/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pekerjaan fisik program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditunda sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. sehingga pelaksanaan program rehabilitasi rumah korban bencana hanya sampai tahap penyusunan proposal.		Triwulan IV	141.681.800	141.681.704	100,00%	
3.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	-	Persentase kualitas kawasan permukiman	%	64,29	Triwulan I	60,66%	60,66%	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng	64.700.000	Triwulan I	16.300.000	9.472.000	58,11%
					Triwulan II	61,00%	61,00%	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan II	30.100.000	25.200.000	83,72%	
					Triwulan III	63,00%	61,23%	97,19%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan III	50.900.000	39.123.552	76,86%	

					Triwulan IV	64,29%	61,24%	95,26%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan IV	64.700.000	64.597.000	99,84%	
4.	Meningkatnya kualitas RTH Publik pada kawasan perkotaan	-	Persentase pengelolaan RTH publik pada kawasan Perkotaan	%	91,43	Triwulan I	70,10%	75,10%	107,13%	Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Penataan taman bungkarne, taman boulevard jalan dan taman telajakan di wilayah kota.	4.185.193.400	Triwulan I	1.427.239.910	567.853.300	39,79%
						Triwulan II	80,00%	80,10%	100,13%	Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Penataan taman bungkarne, taman boulevard jalan dan taman telajakan di wilayah kota.		Triwulan II	2.361.787.160	1.606.135.048	68,01%
						Triwulan III	85,00%	84,09%	98,93%	Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Penataan taman bungkarne, taman boulevard jalan dan taman telajakan di wilayah kota.		Triwulan III	3.312.067.650	2.487.568.738	75,11%
						Triwulan IV	91,43%	84,09%	91,97%	Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Penataan taman bungkarne, taman boulevard jalan dan taman telajakan di wilayah kota.		Triwulan IV	4.185.193.400	4.134.644.034	98,79%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanian	-	Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	%	100,00	Triwulan I	42,00%	24,79%	59,02%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.	76.335.800	Triwulan I	21.052.800	13.952.000	66,27%
						Triwulan II	62,00%	24,79%	39,98%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.		Triwulan II	39.495.800	33.353.192	84,45%
						Triwulan III	81,00%	90,00%	111,11%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.		Triwulan III	57.915.800	51.773.192	89,39%
						Triwulan IV	100,00%	100,00%	100,00%	Memfasilitasi Permohonan rekomendasi peralihan Hak atas tanah oleh Mahesh Gagandas Lalmalani di Desa Pancasari, Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Ikut dalam Kelompok Kerja Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Memfasilitasi dan mendampingi permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Titab Kabupaten Buleleng, Memfasilitasi Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Taman Wisata di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan Memfasilitasi dan Mendampingi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru BTS Kota Singaraja-Mengwitani Tahap 2.		Triwulan IV	76.335.800	76.333.192	100,00%

6.	Menurunnya konflik pertanahan	-	Persentase konflik pertanahan yang di tindaklanjuti	%	100,00	Triwulan I	25,00%	12,58%	50,32%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerakgak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali.	21.734.800	Triwulan I	6.128.000	3.858.800	62,97%
						Triwulan II	50,00%	12,58%	25,16%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerakgak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali (karena kondisi covid 19 belum ada permohonan fasilitasi sengketa).		Triwulan II	11.894.800	10.250.240	86,17%
						Triwulan III	75,00%	75,00%	100,00%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerakgak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali, Masalah HGU I dan II PD Swatantra di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu dan Permasalahan tentang aset tanah SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.		Triwulan III	16.814.800	15.170.240	90,22%
						Triwulan IV	100,00%	100,00%	100,00%	Pendampingan fasilitasi lanjutan atas Konflik Tanah sengketa Eks HGU No 1 PT. Margarana di Desa Pemuteran, Eks HGU 2 dan 3 di Desa Sumberklompok dan Eks HGU No. 1 PT. Dharmajati di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pendampingan fasilitasi terkait Perpanjangan Eks HGU No I Desa Sepang yang diajukan oleh PD. Swatantra Kabupaten Buleleng, Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah di SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.		Triwulan IV	21.734.800	21.730.240	99,98%
7.	Meningkatnya pengelolaan informasi pertanahan yang baik	-	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	%	100,00	Triwulan I	47,00%	25,00%	53,19%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng.	45.998.900	Triwulan I	11.096.100	6.957.200	62,70%
						Triwulan II	64,00%	40,91%	63,92%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan II	21.118.900	17.837.072	84,46%
						Triwulan III	80,00%	75,88%	94,85%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan III	30.958.900	27.677.072	89,40%
						Triwulan IV	100,00%	100,00%	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan IV	45.998.900	45.997.072	100,00%
<b>TOTAL</b>											<b>8.379.334.500</b>		<b>8.379.334.500</b>	<b>8.286.303.734</b>	<b>98,89%</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>															
1.	Terfasilitasinya dan terkendalinya pelaksanaan	-	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	843	Triwulan I	0	0	0,00%	Perekrutan tenaga fasilitator lapangan untuk program APBD dan Penyusunan proposal program BSPS.	3.756.909.000	Triwulan I	54.239.000	33.490.400	61,75%

	pembangunan rumah swadaya				Triwulan II	0	0	0,00%	Penyusunan proposal bantuan rumah swadaya melalui program APBD sudah terlaksana dan proses tanda tangan buku tabungan untuk program BSPS.		Triwulan II	168.339.000	114.701.724	68,14%
					Triwulan III	550	550	100,00%	Program BSPS sebanyak 550 unit sudah tuntas, Program BSPS Desa Tukadsumaga sebanyak 100 unit masih dalam tahap pembangunan dan Program DAK sebanyak 193 unit dalam tahap penyelesaian proposal.		Triwulan III	3.651.249.000	185.581.238	5,08%
					Triwulan IV	843	843	100,00%	Peningkatan Kualitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler sebanyak 650 unit dan Program Peningkatan Kualitas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 193 telah selesai dilakukan.		Triwulan IV	3.756.909.000	3.714.603.812	98,87%
2.	Tersedianya data yang berkualitas yang digunakan dalam perencanaan dan pengembangan perumahan	- Jumlah dokumen Pendataan perumahan yang disusun	Dokumen	1	Triwulan I	0	0	0,00%	Pendataan RTLH (rumah tidak layak huni) di wilayah Kabupaten Buleleng.	86.780.800	Triwulan I	22.070.800	14.982.800	67,89%
					Triwulan II	0	0	0,00%	Pendataan RTLH (rumah tidak layak huni) di wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan II	40.790.800	34.536.680	84,67%
					Triwulan III	0	0	0,00%	Pendataan RTLH (rumah tidak layak huni) di wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan III	64.510.800	53.256.680	82,55%
					Triwulan IV	1	1	0,00%	Pendataan RTLH (rumah tidak layak huni) di wilayah Kabupaten Buleleng.		Triwulan IV	86.780.800	86.716.680	99,93%
3.	Terwujudnya perbaikan rumah akibat bencana alam	- Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Unit	71	Triwulan I	0	0	0,00%	Perekrutan tenaga fasilitator lapangan dan kordinator fasilitator untuk program rehabilitasi rumah korban bencana dan Penyusunan proposal program rehabilitasi rumah korban bencana.	141.681.800	Triwulan I	30.152.500	20.259.800	67,19%
					Triwulan II	0	0	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana.		Triwulan II	79.851.800	70.628.372	88,45%
					Triwulan III	0	0	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana.		Triwulan III	110.766.800	97.611.704	88,12%
					Triwulan IV	0	0	0,00%	Tersusunnya proposal program rehabilitasi rumah korban bencana telah selesai dilakukan. Dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/1064/COVID-19/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Dalam Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pekerjaan fisik program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditunda sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. sehingga pelaksanaan program rehabilitasi rumah korban bencana hanya sampai tahap penyusunan proposal.		Triwulan IV	141.681.800	141.681.704	100,00%

4.	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman	-	Jumlah kawasan permukiman yang tertangani	Kawasan	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng	64.700.000	Triwulan I	16.300.000	9.472.000	58,11%
						Triwulan II	1	1	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan II	30.100.000	25.200.000	83,72%
						Triwulan III	1	1	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan III	50.900.000	39.123.552	76,86%
						Triwulan IV	1	1	100,00%	Pendampingan penanganan kawasan kumuh kabupaten buleleng		Triwulan IV	64.700.000	64.597.000	99,84%
5.	Terwujudnya penataan dan peningkatan kualitas RTH	-	Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dalam kondisi baik	Ha	73,61	Triwulan I	18,44	8	43,38%	Pelaksanaan Kegiatan Penataan RTH Kawasan Perkotaan : Taman Bungkarno , Taman boulevard Jalan dan Taman telajakan di wilayah kota	350.033.900	Triwulan I	95.548.000	31.033.700	32,48%
						Triwulan II	36,88	8	21,69%	Pelaksanaan Kegiatan Penataan RTH Kawasan Perkotaan : Taman Bungkarno , Taman boulevard Jalan dan Taman telajakan di wilayah kota		Triwulan II	250.440.000	124.441.856	49,69%
						Triwulan III	55,32	62,5	112,98%	Pelaksanaan Kegiatan Penataan RTH Kawasan Perkotaan : Taman Bungkarno , Taman boulevard Jalan dan Taman telajakan di wilayah kota		Triwulan III	305.593.900	167.935.856	54,95%
						Triwulan IV	73,61	71,14	96,64%	Pelaksanaan Kegiatan Penataan RTH Kawasan Perkotaan : Taman Bungkarno , RTH Taman Ex. Bank Perniagaan Umum Taman boulevard Jalan dan Taman telajakan di wilayah kota		Triwulan IV	350.033.900	338.307.856	96,65%
6.	Terwujudnya rehabilitasi /pemeliharaan RTH pada kawasan perkotaan	-	Luas RTH kawasan perkotaan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Ha	8,72	Triwulan I	7,27	7,27	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan : RTH Taman Kota , RTH Jalur Hijau Jalan (taman pulau jalan, taman median jalan/boulevard) dan Taman Telajakan.	2.978.779.500	Triwulan I	899.570.010	422.978.900	47,02%
						Triwulan II	7,27	7,27	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan : RTH Taman Kota, RTH Jalur Hijau Jalan (taman pulau jalan, taman median jalan/boulevard) dan Taman Telajakan.		Triwulan II	1.539.996.060	1.170.923.678	76,03%
						Triwulan III	7,27	7,27	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan : RTH Taman Kota, RTH Jalur Hijau Jalan (taman pulau jalan, taman median jalan/boulevard) dan Taman Telajakan.		Triwulan III	2.302.493.450	1.843.388.978	80,06%
						Triwulan IV	8,72	8,72	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan : RTH Taman Kota, RTH Jalur Hijau Jalan (taman pulau jalan, taman median jalan/boulevard) dan Taman Telajakan.		Triwulan IV	2.978.779.500	2.956.925.854	99,27%

7.	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana oprasional pada RTH	-	Jumlah sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan RTH dalam kondisi baik dan siap pakai	Jenis	32	Triwulan I	28	28	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana RTH Kawasan Perkotaan : Pelaksanaan pekerjaan rutin pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pemeliharaan RTH kawasan perkotaan, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Belanja Saporodi.	856.380.000	Triwulan I	432.121.900	113.840.700	26,34%
						Triwulan II	32	32	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana RTH Kawasan Perkotaan : Pelaksanaan pekerjaan rutin pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pemeliharaan RTH kawasan perkotaan, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Belanja Saporodi.		Triwulan II	571.351.100	310.769.514	54,39%
						Triwulan III	32	32	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana RTH Kawasan Perkotaan : Pelaksanaan pekerjaan rutin pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pemeliharaan RTH kawasan perkotaan, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Belanja Saporodi.		Triwulan III	703.980.300	476.243.904	67,65%
						Triwulan IV	32	32	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana RTH Kawasan Perkotaan : Pelaksanaan pekerjaan rutin pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pemeliharaan RTH kawasan perkotaan, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Belanja Saporodi.		Triwulan IV	856.380.000	839.410.324	98,02%
8.	Terfasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	Jumlah pemanfaatan tanah yang terfasilitasi	Lokasi	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.	53.140.000	Triwulan I	14.080.000	9.232.000	65,57%
						Triwulan II	1	1	100,00%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.		Triwulan II	27.100.000	22.757.920	83,98%
						Triwulan III	1	1	100,00%	Memfasilitasi permohonan hak milik atas tanah milik yang berlokasi di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.		Triwulan III	40.120.000	35.777.920	89,18%
						Triwulan IV	1	3	300,00%	Memfasilitasi Permohonan rekomendasi peralihan Hak atas tanah oleh Mahesh Gagandas Lalimalani di Desa Pancasari, Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan Ikut dalam Kelompok Kerja Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng		Triwulan IV	53.140.000	53.137.920	100,00%

		-	Jumlah penyelenggaraan pengadaan tanah yang terfasilitasi	Lokasi	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.	23.195.800	Triwulan I	6.972.800	4.720.000	67,69%
						Triwulan II	1	1	100,00%	Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.		Triwulan II	12.395.800	10.595.272	85,47%
						Triwulan III	1	1	100,00%	Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bendungan tamblang.		Triwulan III	17.795.800	15.995.272	89,88%
						Triwulan IV	1	3	300,00%	Memfasilitasi dan mendampingi permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Titab Kabupaten Buleleng, Memfasilitasi Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Taman Wisata di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan Memfasilitasi dan Mendampingi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru BTS. Kota Singaraja-Mengwitani Tahap 2.		Triwulan IV	23.195.800	23.195.272	100,00%
9.	Terwujudnya pelayanan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitasi	Kasus	4	Triwulan I	1	1	100,00%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali.	21.734.800	Triwulan I	6.128.000	3.858.800	62,97%
						Triwulan II	2	1	50,00%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali (karena kondisi covid 19 belum ada permohonan fasilitasi sengketa).		Triwulan II	11.894.800	10.250.240	86,17%
						Triwulan III	3	3	100,00%	Melaksanakan koordinasi kecamat gerak terkait perkembangan atas SHP 1 dan 2 di desa sumberkima yang merupakan aset tanah Provinsi Bali, Masalah HGU I dan II PD Swatantra di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu dan Permasalahan tentang aset tanah SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada.		Triwulan III	16.814.800	15.170.240	90,22%

					Triwulan IV	4	4	100,00%	Pendampingan fasilitasi lanjutan atas Konflik Tanah sengketa Eks HGU No 1 PT. Margarana di Desa Pemuteran, Eks HGU 2 dan 3 di Desa Sumberklampok dan Eks HGU No. 1 PT. Dharmajati di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pendampingan fasilitasi terkait Perpanjangan Eks HGU No I Desa Sepang yang diajukan oleh PD. Swatantra Kabupaten Buleleng, Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah di SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.		Triwulan IV	21.734.800	21.730.240	99,98%	
10.	Tersedianya dokumen tanah ulayat dan tanah fasum/fasos di wilayah kabupaten	-	Jumlah dokumen tanah ulayat yang disusun	Dokumen	1										
					Triwulan I	1	1	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng	45.998.900	Triwulan I	11.096.100	6.957.200	62,70%	
					Triwulan II	1	1	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng		Triwulan II	21.118.900	17.837.072	84,46%	
					Triwulan III	1	1	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng		Triwulan III	30.958.900	27.677.072	89,40%	
					Triwulan IV	1	1	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng		Triwulan IV	45.998.900	45.997.072	99,996%	
<b>TOTAL</b>										<b>8.379.334.500</b>		<b>8.379.334.500</b>	<b>8.286.303.734</b>	<b>98,89%</b>	
<b>Sasaran Kerja</b>															
1.	Terlaksannya fasilitasi dan pengendalian pembangunan rumah swadaya	-	Jumlah RTLH yang didampingi peningkatan kualitasnya sehingga siap huni	Unit	988										
					Triwulan I	0	0	0,00%	Perekutan tenaga fasilitator lapangan untuk program APBD dan Penyusunan proposal program BSPS.						
					Triwulan II	0	0	0,00%	Penyusunan proposal bantuan rumah swadaya melalui program APBD sudah terlaksana dan proses tanda tangan buku tabungan untuk program BSPS.						
					Triwulan III	550	550	100,00%	Program BSPS sebanyak 550 unit sudah tuntas, Program BSPS Desa Tukadsumaga sebanyak 100 unit masih dalam tahap pembangunan dan Program DAK sebanyak 193 unit dalam tahap penyelesaian proposal.						
					Triwulan IV	988	843	85,32%	Peningkatan Kualitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler sebanyak 650 unit dan Program Peningkatan Kualitas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 193 telah selesai dilakukan.						

2.	Terlaksananya rencana kegiatan seksi penyediaan rumah swadaya berdasarkan data dan program bidang perumahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku	-	Berkas TAPD per penerima bantuan program bantuan rumah swadaya dengan sumber dana APBD	Dokumen	1	Triwulan I	0	0	0,00%	Proses pembuatan proposal bantuan rumah swadaya oleh TFL (tenaga fasilitator lapangan).						
						Triwulan II	0	0	0,00%	Masih dalam proses pembuatan proposal dan pencarian tanda tangan.						
						Triwulan III	0	0	0,00%	Masih dalam proses pencarian tanda tangan TIM TAPD						
						Triwulan IV	1	1	100,00%	TAPD sudah selesai.						
3.	Terlaksananya kerja sama dengan Lembaga dan Instansi lain	-	Perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan PT. Bank BPD Bali tentang penyaluran Bantuan Rumah Swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah.	Dokumen	1	Triwulan I	0	0	0,00%	Proses baru berjalan pada triwulan ke II.						
						Triwulan II	0	0	0,00%	Proses mengalami penundaan karena ada penghentian proses pengadaan barang/jasa dana alokasi khusus (DAK) fisik TA 2020, sesuai Pereturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK 07/2020.						
						Triwulan III	1	1	100,00%	Surat perjanjian kerjasama telah dilaksanakan pada tanggal 4 september 2020 antara PPK Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Bank BPD Bali.						
						Triwulan IV	1	1	100,00%	Surat perjanjian kerjasama telah dilaksanakan pada tanggal 4 september 2020 antara PPK Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Bank BPD Bali.						
4.	Mengkoordinasikan tugas dan megawasi tenaga pertaman	-	Jumlah mengawasi tenaga pertamanan RTH kawasan perkotaan	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Mengawasi tenaga pertamanan RTH kawasan perkotaan.						
						Triwulan II	1	1	100,00%	Mengawasi tenaga pertamanan RTH kawasan perkotaan.						
						Triwulan III	1	1	100,00%	Mengawasi tenaga pertamanan RTH kawasan perkotaan.						
						Triwulan IV	1	1	100,00%	Mengawasi tenaga pertamanan RTH kawasan perkotaan.						
5.	Melaksanakan pengecekan dan melaporkan kondisi sarana dan prasarana	-	Jumlah laporan hasil pengecekan sarana dan prasarana setiap bulan	Laporan	60	Triwulan I	15	15	100,00%	Laporan hasil pengecekan sarana dan prasarana setiap bulan.						
						Triwulan II	30	30	100,00%	Laporan hasil pengecekan sarana dan prasarana setiap bulan.						

	pertamanan				Triwulan III	45	45	100,00%	Laporan hasil pengecekan sarana dan prasarana setiap bulan.							
					Triwulan IV	60	60	100,00%	Laporan hasil pengecekan sarana dan prasarana setiap bulan.							
6.	Mencatat kehadiran tenaga pertamanan	-	Jumlah mencatat kehadiran tenaga harian lepas pertamanan	Laporan	120	Triwulan I	21	21	100,00%	Kehadiran tenaga harian lepas pertamanan.						
						Triwulan II	42	42	100,00%	Kehadiran tenaga harian lepas pertamanan.						
						Triwulan III	63	63	100,00%	Kehadiran tenaga harian lepas pertamanan.						
						Triwulan IV	120	120	100,00%	Kehadiran tenaga harian lepas pertamanan.						
7.	Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman	-	Jumlah kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan RTH	Jenis	10	Triwulan I	4	4	100,00%	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas RTH yang dilaksanakan.						
						Triwulan II	6	6	100,00%	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas RTH yang dilaksanakan.						
						Triwulan III	8	8	100,00%	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas RTH yang dilaksanakan.						
						Triwulan IV	10	10	100,00%	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas RTH yang dilaksanakan.						
8.	Menginfut data kegiatan seksi pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah	-	Jumlah penginfutan data kegiatan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa tanah	Kegiatan	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Penginfutan data kegiatan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.						
						Triwulan II	1	1	100,00%	Penginfutan data kegiatan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.						
						Triwulan III	1	1	100,00%	Penginfutan data kegiatan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.						
						Triwulan IV	1	1	100,00%	Penginfutan data kegiatan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.						
9.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan	-	Jumlah terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa pertanahan	Kegiatan	1	Triwulan I	1	1	100,00%	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa pertanahan.						
						Triwulan II	1	1	100,00%	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa pertanahan.						
						Triwulan III	1	1	100,00%	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa pertanahan.						

					Triwulan IV	1	1	100,00%	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa pertanahan.						
10.	Menginventarisasi sengketa tanah	-	Jumlah penginventarisasian sengketa tanah	Dokumen	8	Triwulan I	2	2	100,00%	Melaksanakan kegiatan penginventarisasian sengketa tanah.					
						Triwulan II	4	4	100,00%	Melaksanakan kegiatan penginventarisasian sengketa tanah.					
						Triwulan III	6	6	100,00%	Melaksanakan kegiatan penginventarisasian sengketa tanah.					
						Triwulan IV	8	8	100,00%	Melaksanakan kegiatan penginventarisasian sengketa tanah.					
11.	Membuat laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan dan penyelesaian sengketa tanah	-	Jumlah pembuatan laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan	Dokumen	8	Triwulan I	2	2	100,00%	Pembuatan laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.					
						Triwulan II	4	4	100,00%	Pembuatan laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.					
						Triwulan III	6	6	100,00%	Pembuatan laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.					
						Triwulan IV	8	8	100,00%	Pembuatan laporan segala pelaksanaan tugas yang terkait dengan seksi penataan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.					
<b>TOTAL</b>															

Singaraja, 04 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Nyoman Suratni, ST.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670102 199803 2 003